

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN
PANGAN BERKELANJUTAN OLEH DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN KABUPATEN INDRAMAYU**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Ilmu
Pemerintahan pada Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh

OLEH :

**RAMLAN MAHESA
3506180135**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS GALUH
2022**

KATA PENGANTAR

Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah atas Rahmat dan Cinta-Nya. Bersolawat kepada Rasulallah Shallallahu Alahi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma Sholli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita menjadi umat yang beruntung karena umat yang sangat dirindukan oleh-Nya.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menempuh Tugas Akhir pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh.

Dalam proses pengerjaan skripsi ini penulis mendapatkan banyak sekali bantuan, dukungan dan saran, baik dalam bentuk materil maupun moril. Segala bentuk bantuan tersebut bagi penulis sangat memberikan memberikan kontribusi dalam pengerjaan skripsi ini.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu dan penghargaan yang tinggi kepada :

1. Bapak H. Aan Anwar Sihabuddin, S.H., S.IP., M.Si. Selaku pembimbing I sekaligus sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh atas bimbingan dan arahan juga sangat berperan dalam menunjang keberhasilan selama penulisan skripsi.
2. Bapak H. Asep Nurwanda, S.HI., M.Si. Selaku pembimbing II yang bukan hanya memberikan bimbingan dan arahan terhadap penulisan skripsi juga memberikan motivasi kehidupan dan sangat berjasa dalam memberikan dukungan moril.
3. Ibu Endah Vestikowati, S.IP., M.SI. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh.

4. Bapak R. Didi Djajuli, S.E., M.M., M.Si. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh
5. Bapak Agus Nurulsyam Suparman., S.IP., M.Si. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh.
6. Ibu Dini Yuliani, S.IP., M.Si. Selaku Ketua Program Studi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh.
7. Bapak Irfan Nursetiawan, S.Pd., M.Pd., M.Si. Selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh.
8. Seluruh dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh.
9. Seluruh jajaran staf dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh.
10. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
11. Kepala Seksi REHALINTAN Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
12. Kepala Badan Penyuluh Pertanian Kecamatan Indramayu, Kecamatan Cikedung, dan Kecamatan Sukra.
13. Kelompok Tani Kecamatan Indramayu, Kecamatan Cikedung, dan Kecamatan Sukra.
14. Kedua Orang Tua tercinta dan seluruh keluarga besar yang selalu mendoakan, serta selalu memberikan dukungan moril maupun materil.
15. Kepada istriku Elok Faiqoh dan anaku Muhammad Adyaksa Kahfi sebagai penyemangat hidup.
16. Kepada sahabat sejati yang selalu memberikan dukungan.
17. seluruh keluarga besar kelas DEF IP angkatan 2018/2019 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam penyusunan skripsi ini. Namun, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam skripsi ini. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik, masukan, dan saran yang membangun untuk menyempurnakan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua pihak yang membutuhkan. Semuga bantuan dan dukungan dari pihak-pihak yang disebutkan di atas menjadi amal yang mendapatkan ridho Tuhan Yang Maha Esa. Aamiin.

Indramayu, Agustus 2022
Yang menyatakan,

Ramlan Mahesa

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Kegunaan Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Penelitian Terdahulu.....	6
2.2 Landasan Teori	10
2.2.1 Implementasi Kebijakan.....	10
2.2.2 Pengertian Implementasi Kebijakan.....	20
2.2.3 Lahan Pertanian.....	31
2.2.4 Perlindungan Lahan Pertanian.....	32
2.2.5 Pangan Berkelanjutan.....	33
2.2.6 Pengertian Ketahanan Pangan.....	34
2.3 Kerangka Pemikiran	35
2.4 Proposisi	36
BAB III METODE PENELITIAN	37
3.1 Desain Penelitian	37
3.2 Operasionalisasi Konsep.....	38
3.3 Data dan Sumber Data	40
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	42
3.5 Teknik Pengolahan/Analisis Data.....	43
3.6 Jadwal Penelitian.....	44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
4.1 Gambaran Umum Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu	46
4.1.1 Visi Misi dan Tujuan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu.....	46
4.1.2 Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu.....	47
4.1.3 Data Ketersediaan Peralatan pada dan Pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu.....	50
4.1.4 Karakteristik Informan	53
4.1.4.1 Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis Kelamin.....	53
4.1.4.2 Karakteristik Informan Berdasarkan Usia.....	54
4.1.4.3 Karakteristik Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	55
4.1.4.4 Karakteristik Informan Berdasarkan Jabatan.....	56
4.1.5 Deskripsi Hasil Penelitian.....	57
4.1.5.1 Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu.....	57
4.1.5.2 Hambatan-hambatan dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu	89
4.1.5.3 Upaya dalam mengatasi Hambatan-Hambatan Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu.....	121

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian.....	153
4.2.1 Pembahasan Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu	153
4.2.2 Pembahasan mengenai Hambatan-hambatan dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu	158
4.2.3 Pembahasan mengenai Upaya dalam mengatasi Hambatan-Hambatan Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu	159
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	162
5.1 Kesimpulan.....	162
5.2 Saran	163
DAFTAR PUSTAKA	165
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	169

DAFTAR TABEL

TABEL 3.1	Jadwal Penelitian Tahun 2021/2022.....	45
TABEL 4.1	Data Pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Petanian Kabupaten Indramayu Berdasarkan Tingkat Pendidikan (Desember 2021).....	51
TABEL 4.2	Data PNS Dinas Ketahanan Pangan dan Petanian Kabupaten Indramayu Berdasarkan Golongan Pegawai (Mei 2021).....	52
TABEL 4.3	Data Sarana dan Prasarana Dinas Ketahanan Pangan dan Petanian Kabupaten Indramayu.....	53
TABEL 4.4	Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis Kelamin.....	54
TABEL 4.5	Karakteristik Informan Berdasarkan Usia.....	55
TABEL 4.6	Karakteristik Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	56
TABEL 4.7	Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis Kelamin Jabatan.....	57
TABEL 4.8	Informasi Informan.....	58

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 2.1	Kerangka Pemikiran/Alur Pemikiran.....	36
GAMBAR 4.1	Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu.....	49

LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 SK Bimbingan Skripsi
- LAMPIRAN 2 Pedoman Wawancara
- LAMPIRAN 3 Berita Acara Wawancara
- LAMPIRAN 4 Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Berbicara pertanian tidak terlepas dari lahan. Lahan merupakan faktor utama dalam pengembangan pertanian. Oleh karena itu, pada tahun 2009 Pemerintah bersama-sama dengan DPR mengesahkan lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Undang-Undang ini diharapkan dapat menahan laju konversi lahan sawah khususnya sawah dengan irigasi teknis sehingga dapat menopang ketahanan pangan nasional dan Indonesia memiliki lahan pertanian abadi.

Sebagai Negara agraris yang memiliki serapan tenaga kerja terbanyak dibandingkan sektor ekonomi lainnya, sektor pertanian menjadi salah satu tumpuan pembangunan nasional, khususnya dalam penyediaan pangan. Pasokan pangan lokal menjadi tumpuan bagi penyediaan pangan nasional. Namun, seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, peningkatan aktivitas ekonomi, serta peningkatan kebutuhan pangan menyebabkan upaya mencapai ketahanan pangan nasional di masa mendatang menjadi semakin berat. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya permintaan dan turun naiknya produksi dan produktivitas pangan nasional. Dengan kata lain, produksi pangan sangat dipengaruhi iklim, apalagi sekarang ini pertanian dihadapkan pada fenomena iklim yang tidak menentu sebagai akibat terjadinya perubahan iklim.

Guna memperkuat kedudukan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, selanjutnya Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu mengeluarkan peraturan perundangan-undangan dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu, Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan hanya dapat dilakukan untuk kepentingan publik saja sedangkan alih fungsi lainnya tidak diperkenankan. Peraturan tentang insentif dimaksudkan bahwa pemerintah daerah memberikan insentif kepada lahan pertanian yang terkena Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berupa perbaikan prasarana dan sarana serta bantuan input produksi sampai dengan pasca panen, misalnya jaminan harga. Sedangkan peraturan tentang sistem informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dimaksudkan untuk memberikan arahan bahwa penetapan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus dapat diakses ataupun diinformasikan ke masyarakat. Adapun peraturan tentang pembiayaan pada dasarnya menjelaskan kegiatan-kegiatan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang didanai serta sumber pendanaannya.

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu ini terkait dengan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ini masih dapat dikatakan relevan dengan prioritas Nawa Cita yang disebutkan di dalam RPJMN Tahun 2015-2019. Pada Nawa Cita ke-5 disebutkan bahwa “Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia”. Artinya, salah satu wujud dari peningkatan kualitas hidup adalah dengan peningkatan kesejahteraan penduduk. Peningkatan kesejahteraan

hidup petani lebih dikaitkan pada penguasaan lahan pertanian. Oleh karena itu, prioritas ini masih memiliki relevansi dengan upaya perlindungan petani melalui Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Akan tetapi, seiring perjalanan waktu setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ini, implementasi dari regulasi tersebut belum mampu mengimbangi alih fungsi lahan yang terus terjadi. Disisi lain, program pencetakan sawah baru yang menjadi salah satu tupoksi Peraturan Daerah ini sering kali tidak mencapai target dan masih menyisakan berbagai permasalahan, hal ini dapat dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut:

1. Kurangnya komunikasi dan sosialisasi kepada petani tentang informasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, sehingga menyebabkan masyarakat petani yang lahannya terkena alih fungsi lahan.
2. Ketersediaan sumber daya pendukungnya seperti petani, irigasi, dan ketersediaan sarana dalam proses berjalannya kebijakan.
3. Sikap dari pelaksana kebijakan yang kurang maksimal dalam penguasaan tugas pokok dan fungsi.

Berangkat dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang secara khusus penulis tuangkan dalam bentuk usulan penelitian dengan mengambil judul : **Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang dapat penulis ajukan adalah: Bagaimana Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu.

1.4 Kegunaan Penelitian

Selanjutnya penulis akan mengemukakan mengenai apa yang menjadi kegunaan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1.4.1 Secara Teoritis

1. Guna menjadi bahan pengetahuan dalam kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dapat menunjang dalam pengembangan Ilmu Pemerintahan.
2. Guna menambah kepustakaan mengenai kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan khususnya Ilmu Pemerintahan di perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Galuh.

1.4.2 Secara Praktis

1. Sebagai bahan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Kabupaten Indramayu dalam hal implementasi kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
2. Sebagai bahan masukan bagi masyarakat petani Kabupaten Indramayu dalam hal implementasi kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Sebagai salah satu perbandingan dalam penyusunan penelitian ini, maka terdapat penelitian terdahulu sebagai dasar penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

Wicaksono, 2020: Implementasi Program Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Karawang: Studi Kasus Penetapan Luas Baku Sawah.

Indonesia merupakan negara yang memiliki sumberdaya alam yang kaya di bidang pertanian. Mata pencaharian masyarakatnya masih tergantung pada sektor pertanian khususnya pada komoditi padi. Fenomena penurunan produksi diperkirakan terjadi karena penurunan lahan seluas 41.61 ribu hektar (0.30%) dan penurunan produktivitas sebesar 0.17 Ku/Ha (0.33) dibandingkan pada tahun 2013 (BPS. 2015). Kondisi ini disebabkan adanya alih fungsi lahan dari lahan pertanian beralih ke lahan non pertanian. Peningkatan kebutuhan dan pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin meningkat setiap tahunnya. Masalah akan terjadi apabila kebutuhan papan (perumahan. industri. perkantoran dan pusat perbelanjaan) lebih besar daripada kebutuhan pangan. Kurangnya tanah pertanian dalam memenuhi fungsinya tersebut secara terpaksa harus mengalah untuk sektor yang lain. yaitu dengan

mengurangi jumlah tanah pertanian untuk dikembangkan menjadi sektor yang lebih diprioritaskan.

Penelitian ini menggunakan Pendekatan deskriptif kualitatif diharapkan akan dilakukan penggalian informasi mengenai fakta, kejadian dan permasalahan yang terjadi dalam penetapan, pelaksanaan dan pengawasan LP2B untuk menjawab tujuan yang telah ditetapkan. Dengan pendekatan kualitatif juga dapat digali deskripsi ide, gagasan, opini, perspektif dari para *stakeholder* yang terlibat dalam penetapan, pelaksanaan dan pengawasan LP2B, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Data primer dikumpulkan di tingkat pusat dan daerah dari para pengambil kebijakan, penyusun peraturan dan pelaksana terkait perencanaan, implementasi dan pengawasan LP2B. Khusus di daerah, data primer juga digali dari petani. Data sekundair diperoleh lewat literatur dan aturan teknis dan yuridis.

Lahan pertanian pangan berkelanjutan sebuah kebijakan yang dalam implementasinya terkendala komitmen politik stakeholders dan kesiapan petani. Di tataran teknis fase awalnya terkendala analisis spasial. Tulisan mencoba mendeskripsikan secara kualitatif kendala yang dihadapi untuk menetapkan sawah sebagai obyek LP2B dan mencoba memberikan solusi apa yang harus dilakukan secara sistematis.

Saptini, 2015: Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Klaten Dalam Rangka Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Klaten berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten serta untuk mengetahui hambatan-hambatan kebijakan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Klaten serta solusi mengenai hambatan yang dihadapi. Untuk mencapai tujuan tersebut telah dilakukan penelitian hukum yuridis empiris, sifat penelitian adalah diskriptif, sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Tehnik pengumpulan data meliputi wawancara dan studi pustaka .
Tehnik analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Hasil kajian diperoleh hasil bahwa: Upaya pencegahan alih fungsi lahan pertanian sangat sulit dilakukan. Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam perlindungan lahan pertanian berkelanjutan diantaranya adalah:

- 1). Peraturannya belum berjalan sesuai dengan yang direncanakan,
- 2). Aparat penegak hukum belum berjalan secara maksimal.
- 3). Masyarakat belum semua memahami peraturan yang berlaku dan belum mengerti lahan pertaniannya masuk zona lahan yang dilindungi.

Solusi untuk pengendalian alih fungsi lahan pertanian meliputi:

- a). Mengarahkan pembangunan dan pengembangan kawasan terbangun pada lahan yang bukan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan,
- b). Menetapkan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan,
- c). Mengembangkan produktivitas pertanian, dan
- d). Mengendalikan alih fungsi lahan pertanian berkelanjutan.

Untuk mencegah alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan agar tidak menyebabkan semakin menyempitnya lahan pertanian di Kabupaten Klaten maka saat ini sudah diberlakukan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031.

Berdasarkan hasil uraian peneliti terdahulu diketahui bahwa terdapat beberapa persamaan dan juga perbedaan dengan penelitian yang penulis laksanakan, yaitu:

Persamaan yang dimiliki; sama-sama meneliti mengenai Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sama-sama penelitian tentang implementasi kebijakan dengan menggunakan teori yang sama.

Perbedaannya terletak pada lokus penelitian dengan kultur social yang berbeda. begitu pula dengan objek penelitian, waktu penelitian dan informan yang digunakan juga berbeda.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Implementasi Kebijakan

2.2.1.1 Pengertian Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Berikut ini adalah pengertian tentang implementasi menurut para ahli.

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Wahab, (2015:64) adalah:

Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).

Selanjutnya menurut Wahab (2015:65) menyatakan bahwa implementasi adalah : “Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan.”

Sedangkan menurut Winarno (2012:68) implementasi adalah: tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.

Kemudian Usman, (2012:70) mengemukakan: Implementasi adalah kegiatan yang bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme

suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli yang dikemukakan di atas, maka dapat disampaikan bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan atau rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Widodo (2013:88) meyakini bahwa:

Implementasi adalah suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber yang termasuk manusia, dana, dan kemampuan organisasional yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta (individu atau kelompok). Proses tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan.

Kemudian Leo Agustino (2017:139) mengemukakan bahwa:

Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Selanjutnya Mazmanian & Sabatier (Widodo, 2013:88) menjelaskan bahwa :

“Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah, atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan”.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli yang dikemukakan di atas, maka dapat disampaikan bahwa implementasi bermuara pada mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara

sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh obyek berikutnya. Dengan demikian hakekat dari implementasi merupakan rangkaian kegiatan yang terencana dan bertahap yang dilakukan oleh instansi pelaksana dengan didasarkan pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh otoritas berwenang.

2.2.1.2 Pengertian Kebijakan

Istilah kebijakan memiliki cakupan pengertian yang sangat luas. Beberapa ahli berpendapat mengenai pengertian kebijakan sesuai dengan pandangan masing-masing. Anderson (Abdoellah dan Rusfiana, 2016:16) menyatakan bahwa “kebijakan merupakan langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor yang berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi”.

Sedangkan Fredrich (Widodo, 2013:13) menyatakan bahwa:

Kebijakan sebagai suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Meskipun kebijakan mengatur apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan namun kebijakan hanya bersifat adaptif dan intepretatif.

Kemudian Wahab (2015:3) menyatakan bahwa :

Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan

tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Anderson, dalam (Abdoellah dan Rusfiana, 2016:16) menyatakan bahwa “kebijakan merupakan langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor yang berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi”.

Sedangkan Fredrich (Widodo, 2013:13) menyatakan bahwa:

Kebijakan sebagai suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli yang dikemukakan di atas, maka dapat disampaikan bahwa kebijakan merupakan suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Kebijakan diciptakan untuk mengatur kehidupan masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Selanjutnya Tangkilisan, (2001:12), kebijakan adalah:

Suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu sambil mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan / mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Untuk lebih lanjut Indiahono (2009:18) menyatakan bahwa :

Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang di usulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli yang dikemukakan di atas, maka dapat disampaikan bahwa kebijakan merupakan suatu usaha untuk mencapai tujuan tertentu yang dilakukan atas usaha yang dilakukan oleh individu maupun kelompok yang tujuannya untuk memecahkan, mengurangi atau mencegah suatu masalah dengan cara tertentu, yaitu dengan tindakan terarah artinya tindakan yang dikerjakan secara teliti, cermat, sistematis, dengan menggunakan metode atau norma atau standar tertentu.

2.2.1.3 Elemen-Elemen Kebijakan

Adapun elemen-elemen kebijakan menurut Islamy (2014: 17) adalah sebagai berikut :

Kebijakan sebagai salah satu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan, oleh karena itu suatu kebijakan harus memuat 3 elemen yaitu:

- a. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai
- b. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan
- c. Menyediakan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

Kemudian menurut Anderson (dalam Widodo 2010:14) yaitu :

- a. Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu.
- b. Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.

- c. kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah dan bukan apa yang bermaksud akan dilakukan pemerintah.
- d. kebijakan publik bersifat positif (mengenai tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu).
- e. kebijakan publik (positif) selalu berdasarkan pada peraturan perundangan tertentu yang bersifat memaksa.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli yang dikemukakan di atas, maka dapat disampaikan bahwa terdapat elemen-elemen dalam kebijakan antara lain adanya tujuan, adanya tindakan yang dilakukan untuk mengatasi masalah dan pelaksanaan kebijakan didasarkan pada peraturan yang berlaku yang bersifat memaksa serta adanya strategi yang dilakukan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Selanjutnya menurut Putra (2003:81) elemen-elemen dalam kebijakan antara lain sebagai berikut :

- 1. Pembentukan unit organisasi baru dan staf pelaksana
- 2. Penjabaran tujuan ke dalam berbagai aturan pelaksana (*Standard Operating Procedure / SOP*)
- 3. Koordinasi berbagai sumber dan pengeluaran kepada kelompok sasaran; pembagian tugas didalam dan diantara dinas-dinas/badan pelaksana
- 4. Pengalokasian sumber-sumber untuk mencapai tujuan

Hal tersebut senada dengan pendapat Silalahi (2013:134) menyatakan

bahwa elemen-elemen dalam kebijakan antara lain :

- 1. Kreasi dan *staffing agent* pelaksana baru, guna mengimplementasikan kebijakan baru atau menetapkan tanggung jawab implemtasi kepada personil dan agen yang ada.
- 2. Penerjemah dimaksud dan tujuan legislatif kedalam aturan operasional yang baik, perlu pengembangan garis keterpaduan bagi para implementator.
- 3. Koordinasi sumber daya agen dan pelayanan terhadap kelompok sasaran, pengembangan devisi tanggung jawab dalam agen antara agen-agen yang terkait.
- 4. Alokasi sumber dayaguna kesempurnaan dampak kebijakan.

Dengan demikian suatu kebijakan dapat dilaksanakan oleh organisasi dengan baik apabila elemen-elemen tersebut dilaksanakan sehingga apa yang menjadi tujuan organisasi dapat dicapai. Kebijakan mengandung suatu unsur tindakan untuk mencapai tujuan dan umumnya tujuan tersebut ingin dicapai oleh seseorang, kelompok ataupun pemerintah. Kebijakan tentu mempunyai hambatan-hambatan tetapi harus mencari peluang-peluang untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang diinginkan.

2.2.1.4 Tahap-Tahap Kebijakan

Proses kebijakan publik terdiri dari lima tahapan menurut Subarsono (2009:13) sebagai berikut :

- a. Penyusunan agenda (*agenda setting*), yakni suatu proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah.
- b. Formulasi kebijakan (*policy formulation*), yakni proses perumusan pilihan-pilihan oleh pemerintah.
- c. Pembuatan kebijakan (*decision making*), yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu tindakan.
- d. Implementasi kebijakan (*policy implementation*), yaitu proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil.
- e. Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*), yakni proses untuk memonitor dan menilai hasil kinerja kebijakan.

Menurut Winarno (2012:35) mengemukakan bahwa:

Proses pembuatan kebijakan merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Proses-proses penyusunan kebijakan tersebut dibagi kedalam beberapa tahapan. Tahapan-tahapan kebijakan adalah sebagai berikut:

1. Tahap Penyusunan Agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak

disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

2. Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

3. Tahap Adopsi Kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.

4. Tahap Implementasi Kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia.

5. Tahap Evaluasi Kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauhmana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli yang dikemukakan di atas, maka dapat disampaikan bahwa tahap-tahap kebijakan merupakan serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan di dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis, aktivitas politis tersebut divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling tergantung yang diatur menurut urutan waktu.

2.2.1.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembuatan kebijakan

Pembuatan kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan menurut Suharno (2010:52) adalah sebagai berikut :

- a) Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar
Tidak jarang pembuat kebijakan harus memenuhi tuntutan dari luar atau membuat kebijakan adanya tekanan-tekanan dari luar.
- b) Adanya pengaruh kebiasaan lama
Kebiasaan lama organisasi yang sebagaimana disebutkan dengan istilah sunk cost, seperti kebiasaan investasi modal yang hingga saat ini belum profesional dan terkadang amat birokratik, cenderung akan diikuti kebiasaan itu oleh para administrator, meskipun keputusan/kebijakan yang berkaitan dengan hak tersebut dikritik, karena sebagai suatu yang salah dan perlu diubah. Kebiasaan lama tersebut sering secara terus-menerus pantas untuk diikuti, terlebih kalau suatu kebijakan yang telah ada tersebut dipandang memuaskan.
- c) Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi
Berbagai keputusan/kabijakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan/kebijakan banyak dipengaruhi oleh sifat-sifat pribadinya. Sifat pribadi merupakan faktor yang berperan besar dalam penentuan keputusan/kebijakan
- d) Adanya pengaruh dari kelompok luar
Lingkungan sosial dari para pembuat keputusan/kebijakan juga berperan besar.
- e) Adanya pengaruh keadaan masa lalu
Maksud dari faktor ini adalah bahwa pengalaman latihan dan pengalaman sejarah pekerjaan yang terdahulu berpengaruh pada pembuatan kebijakan/keputusan. Misalnya, orang mengkhawatirkan pelimpahan wewenang yang dimilikinya kepada orang lain karena khawatir disalahgunakan.

Selanjutnya Islamy, (2011:90), pembuatan kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu :

1. *Idealized policy* yaitu pola interaksi yang digagas oleh perumus kebijakan dengan tujuan untuk mendorong, mempengaruhi dan merangsang target group untuk melaksanakannya.
2. *Target groups* yaitu bagian dari policy stake holders yang diharapkan dapat mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang diharapkan oleh perumus kebijakan. Karena kelompok ini menjadi

sasaran dari implementasi kebijakan, maka diharapkan dapat menyesuaikan pola-pola perilaku dengan kebijakan yang telah dirumuskan.

3. *Implementing organization* yaitu badan-badan pelaksana yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan.
4. *Environmental factors* yaitu unsur-unsur di dalam lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan seperti aspek budaya, sosial, ekonomi dan politik.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli yang dikemukakan di atas, maka dapat disampaikan bahwa adanya faktor yang dapat mempengaruhi suatu pembuatan kebijakan. Hal ini dipengaruhi karena pada dasarnya kebijakan tidak selalu berada pada tempat yang vakum, sehingga terdapat berbagai macam faktor yang mempengaruhi disekelilingnya yang turut mempengaruhi pembuatan kebijakan.

2.2.2 Pengertian Implementasi Kebijakan

Van Meter dan Van Horn (Wahab, 2017:135) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai “Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individual/pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”.

Adapun makna implemementasi kebijakan menurut Mazmanian dan Sabatier (Wahab, 2017:135-136) yaitu:

Implementasi kebijakan adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan publik yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Wahab (2015:43) mengemukakan definisi dari beberapa sumber mengenai implementasi kebijakan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijaksanaan, yang biasanya dalam bentuk Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Peradilan, Keputusan Menteri, dan lain-lain.
- 2) Implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu (pejabat) atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Berdasarkan pandangan yang diutarakan oleh beberapa ahli di atas maka implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi kebijakan merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri. Bentuk dari kebijakan itu biasanya berupa produk hukum seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Peradilan, Keputusan Menteri, dan lain-lain.

Wahab (2014: 21) menyatakan bahwa :

Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Fokus implementasi kebijakan adalah kejadian-kejadian atau kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disyahkan pedoman-pedoman kebijaksanaan negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikanya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat.

Sedangkan menurut Purwanto dan Sulistyastuti (2012 : 21) adalah sebagai berikut:

Implementasi kebijakan adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluran kebijakan (*to deliver Policy output*) yang dilakukan oleh implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai uapaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Tujuan kebijakan diharapkan akan muncul

manakala *policy output* dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran sehingga dalam jangka panjang hasil kebijakan akan mampu terwujud.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli yang dikemukakan di atas, maka dapat disampaikan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat atau kelompok yang diarahkan untuk melaksanakan suatu keputusan sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal.

Hakikat dari implementasi kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi setelah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

2.2.2.1 Syarat-syarat Impelementasi Kebijakan

Agar kebijakan dapat terimplementasi dengan sempurna maka terdapat syarat-syarat seperti dikemukakan Wahab, (2014: 70) yaitu :

- (1) Kondisi eksternal (sikap masyarakat) yang dihadapi oleh pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan atau kendala serius;
- (2) Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber daya yang cukup memadai;
- (3) Perpaduan sumber daya yang diperlukan benar-benar tersedia;
- (4) Program yang akan dilaksanakan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang handal;
- (5) Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya;
- (6) Hubungan saling ketergantungan harus kecil;
- (7) Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan;
- (8) Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat; dan
- (9) Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.

Selanjutnya Leo Agustino, (2016:11) implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa syarat seperti isi (*contents*) dan lingkungan (*contexts*) pelaksanaan kebijakan. Kedua syarat tersebut antara lain sebagai berikut :

Isi kebijakan dalam konteks implementasi kebijakan mencakup :

- (1) *interests affected* (kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan);
- (2) *type of benefits* (jenis manfaat yang dihasilkan);
- (3) *extent of change envisioned* (derajat perubahan yang diinginkan);
- (4) *site of decision making* (kedudukan pembuat kebijakan);
- (5) *program implementors* (siapa pelaksana program); dan
- (6) *resources committed* (sumber daya yang dikerahkan).

Sedangkan konteks kebijakan yang mempengaruhi keberhasilan implementasi program adalah kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang mencakup:

- (1) *power, interest, and strategies of actors involved* (kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor terlibat);
- (2) *institution and regime characteristics* (karakteristik lembaga dan penguasa); dan
- (3) *compliance and responsiveness* (kepatuhan serta daya tanggap pelaksana).

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli yang dikemukakan di atas, maka dapat disampaikan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa persyaratan yang harus dipahami oleh pelaksana kebijakan karena ketidakpahaman pelaksana terhadap persyaratan dalam implementasi kebijakan maka tujuan kebijakan tidak akan tercapai dan tidak akan memberikan manfaat.

2.2.2.2 Tahap-Tahap dalam Implementasi Kebijakan

Menurut Surbakti (2013:198), dalam mengimplementasikan suatu kebijakan terdapat beberapa tahap yang harus dilaksanakan, yaitu sebagai berikut:

1. Menyediakan sumber daya (anggaran, personil dan sarana) bagi pelaksanaan kebijakan

Variabel sumber daya, bukan hanya menyangkut sumber daya manusia semata melainkan juga mencakup kemampuan sumber daya mineral lainnya yang mendukung kebijakan tersebut dan faktor dana.

Sumber daya meliputi:

- (1) Staf ukuran yang tepat dengan keahlian yang diperlukan;
- (2) Informasi yang relevan dan cukup tentang tata cara mengimplementasikan kebijakan dan penyesuaian lainnya yang terlibat dalam implementasi;
- (3) Kewenangan untuk meyakinkan bahwa kebijakan kebijakan dilakukan semuanya;
- (4) Sumber daya yang tidak cukup berarti bahwa undang-undang tidak akan diberlakukan, pelayanan tidak akan diberikan, dan peraturan-peraturan yang layak tidak akan dikembangkan.

2. Melakukan interperensi dan penjabaran kebijakan dalam bentuk peraturan pelaksanaan dan petunjuk pelaksanaan.

Interperensi dan penjabaran kebijakan dalam bentuk peraturan pelaksanaan dan petunjuk pelaksanaan mempunyai peranan yang penting sebagai acuan pelaksanaan kebijakan mengetahui persis apa yang akan dikerjakan, ini berarti komunikasi juga dinyatakan dengan perintah dari atasan terhadap pelaksana kebijakan, sehingga komunikasi harus dinyatakan dengan jelas, cepat dan konsisten.

Proses komunikasi terjadi antara pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan dan sasaran kebijakan dimana dalam komunikasi tersebut terdapat penekanan pada dua aspek yaitu proses penyampaian dan kejelasan isi program. Kemampuan kerja pelaksana diturunkan dari variabel sumber daya.

Dengan adanya komunikasi, implementor dapat menterjemahkan kebijakan-kebijakan yang ada dengan tepat, akurat, dan konsisten. Jika pemberian informasi mengenai kebijakan kurang jelas, maka akan menimbulkan kesalahpahaman diantara pembuat kebijakan dan implementornya.

3. Menyusun rencana sejumlah langkah kegiatan pelaksanaan menurut waktu, tempat, situasi, dan anggaran.

Pelaksanaan suatu kebijakan didasarkan pada rencana yang ditetapkan sehingga keberhasilan suatu kebijakan ditentukan dengan baik buruknya proses perencanaan yang disusun. Dengan demikian dalam penyusunan perencanaan suatu kegiatan sebaiknya disesuaikan dengan waktu penyusunan kegiatan, tempat dilaksanakannya kegiatan, situasi yang mendukung atau menghambat keberhasilan suatu kegiatan serta adanya anggaran yang memadai dalam pelaksanaan suatu kebijakan yang akan dilaksanakan.

4. Pengorganisasian secara rutin atas personil, anggaran dan sarana materil lainnya.

Pengorganisasian secara rutin atas personil, anggaran dan sarana materil lainnya memberikan pengertian bahwa penerapan kebijakan

tidak akan berhasil jika terdapat kelemahan dalam struktur. Dalam hal ini ada 2 karakteristik birokrasi yang umum, yaitu penggunaan sikap dan prosedur yang rutin, serta transformasi dalam pertanggung jawaban di antara unit organisasi sehingga pelaksanaan kebijakan dapat didukung dengan adanya anggaran dan sarana materil lainnya.

5. Memberikan manfaat kepada dan/atau pengenaan beban dan pengaturan perilaku terhadap individu dan masyarakat pada umumnya.

Implementasi kegiatan pada dasarnya akan memberikan manfaat kepada masyarakat jika dalam pelaksanaannya memperhatikan beberapa prinsip seperti memberikan kemudahan kepada masyarakat sehingga masyarakat memperoleh manfaat dengan adanya kebijakan tersebut.

6. Pemantauan (monitoring) dan evaluasi pelaksanaan kebijakan merupakan tahap terakhir dari proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan.

Keberhasilan suatu kebijakan tidak terlepas dari pemantauan atau evaluasi yang dilakukan terhadap kegiatan yang dilaksanakan karena kegagalan suatu kegiatan terletak pada tahap pelaksanaannya sehingga dengan demikian agar suatu kebijakan berhasil maka diperlukan adanya pemantauan terhadap proses pelaksanaan kebijakan.

Selanjutnya Sugandi (2011:89) menyatakan tahap-tahap implementasi

kebijakan antara lain :

1. Tahap Interpretasi
Tahap ini merupakan tahap penjabaran sebuah kebijakan yang bersifat abstrak dan sangat umum ke dalam kebijakan atau tindakan yang lebih bersifat mana jerial dan operasional. Kebijakan abstrak biasanya tertuang dalam bentuk peraturan perundangan yang dibuat oleh lembaga eksekutif dan legislative, bisa berbentuk perda ataupun undang-undang.
2. Tahap Pengorganisasian
Kegiatan ini adalah penentu pelaksana kebijakan (*policy implementor*) yang setidaknya dapat diidentifikasi sebagai lembaga, instansi pemerintah, LSM maupun komponen masyarakat. Setelah pelaksana kebijakan ditetapkan maka dilakukan penentuan prosedur tetap kebijakan yang berfungsi sebagai pedoman, petunjuk dan referensi bagi pelaksana dan sebagai pencegah terjadinya kesalahpahaman saat para pelaksana tersebut menghadapi masalah. Prosedur tetap tersebut terdiri atas prosedur operasi standar (SOP) atau standar pelayanan minimal (SPM). Kemudian penentuan besaran anggaran biaya dan sumber pembiayaan. Sumber pembiayaan bisa diperoleh dari sektor pemerintah (APBN/ APBD) maupun sektor lain (swasta/

masyarakat). Selain itu juga diperlukan penentuan peralatan dan fasilitas yang diperlukan, sebab peralatan tersebut akan berperan penting dalam menentukan efektivitas dan efisiensi pelaksana kebijakan. Langkah selanjutnya penetapan manajemen pelaksana kebijakan, diwujudkan dalam penentuan pola kepemimpinan dan koordinasi pelaksana, dalam hal ini penentuan point pelaksana kebijakan. Setelah itu, jadwal pelaksanaan implementasi kebijakan segera disusun untuk memperjelas hitungan waktu dan sebagai salah satu alat penentu efisiensi implementasi sebuah kebijakan.

3. Tahap Implikasi

Pada tahap ini adalah perwujudan masing-masing tahapan yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Sementara itu menurut pandangan Ripley (Subarsono, 2020:11) tahapan

kebijakan adalah:

1) Tahap Penyusunan Agenda Kebijakan

Dalam tahap ini, ada tiga kegiatan yang perlu dilakukan, yakni:

- a. Membangun persepsi di kalangan *stakeholders* bahwa sebuah fenomena benar-benar dianggap sebagai masalah. Sebab bisa jadi suatu gejala oleh kelompok masyarakat tertentu dianggap masalah. Sebab bisa jadi suatu gejala oleh kelompok masyarakat tertentu dianggap masalah, tetapi oleh sebagian masyarakat yang lain atau elite politik bukan dianggap sebagai masalah;
- b. Membuat batasan masalah;
- c. Memobilisasi dukungan agar masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah. Memobilisasi dukungan ini dapat dilakukan dengan cara mengorganisir kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat, dan kekuatan-kekuatan politik, publikasi melalui media massa, dan sebagainya.

2) Tahap Formulasi dan Legitimasi Kebijakan

Pada tahap ini, analisis kebijakan perlu mengumpulkan dan menganalisis informasi yang berhubungan dengan masalah yang bersangkutan, kemudian berusaha mengembangkan alternatif-alternatif kebijakan, membangun dukungan dan melakukan negosiasi, sehingga sampai pada sebuah kebijakan yang dipilih.

3) Tahap Implementasi Kebijakan

Pada tahap ini perlu dukungan sumberdaya, dan penyusunan organisasi pelaksana kebijakan. Dalam proses implementasi sering ada mekanisme insentif dan sanksi agar implementasi suatu kebijakan berjalan dengan baik dan tindakan kebijakan akan dihasilkan kinerja dan dampak kebijakan.

- 4) Tahap Evaluasi terhadap Implementasi, Kinerja, dan Dampak Kebijakan
Tindakan (implementasi) kebijakan akan dihasilkan kinerja dan dampak kebijakan, yang memerlukan proses berikutnya yakni evaluasi. Hasil evaluasi ini bermanfaat bagi penentuan kebijakan yang akan lebih baik dan lebih berhasil.

Sedangkan proses kebijakan menurut Anderson (Subarsono, 2020:12)

adalah sebagai berikut:

- a. Formulasi Masalah (*Problem Formulation*)
Apa masalahnya? Apa yang membuat hal tersebut menjadi masalah kebijakan? Bagaimana masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah?
- b. Formulasi Kebijakan (*Formulation*)
Bagaimana mengembangkan pilihan-pilihan atau alternatif-alternatif untuk memecahkan masalah tersebut? Siapa saja yang berpartisipasi dalam formulasi kebijakan?
- c. Penentuan Kebijakan (*Adoption*)
Bagaimana alternatif ditetapkan? Persyaratan atau kriteria seperti apa yang harus dipenuhi? Siapa yang akan melaksanakan kebijakan? Bagaimana proses atau strategi untuk melaksanakan kebijakan? Apa isi dari kebijakan yang telah ditetapkan?
- d. Implementasi (*Implementation*)
Siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan? Apa yang mereka kerjakan? Apa dampak dari isi kebijakan?
- e. Evaluasi (*Evaluation*)
Bagaimana tingkat keberhasilan atau dampak kebijakan diukur? Siapa yang mengevaluasi kebijakan? Apa konsekuensi dari adanya evaluasi kebijakan? Adakah tuntutan untuk melakukan perubahan atau pembatalan?

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli yang dikemukakan di atas, maka dapat disampaikan bahwa terdapat beberapa tahap yang harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan karena tahapan-tahapan tersebut akan menentukan keberhasilan sebuah implementasi kebijakan.

2.2.2.3 Faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Variabel-variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan berdasarkan teori George C. Edward III dalam (Subarsono, 2020:90-92) dengan asumsi bahwa variabel tersebut relevan di lapangan, antara lain:

- a. Faktor Komunikasi
Komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Informasi mengenai kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapaisesuai dengan yang diharapkan.
- b. Faktor Sumberdaya
Faktor sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Sumberdaya tersebut meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, dan sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan.
- c. Faktor Disposisi
Pengertian disposisi dikatakan sebagai ‘kemauan, keinginan dan kecenderungan para perlaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan’. Jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (implementors) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.
- d. Faktor Struktur Birokrasi
Terdapat enam karakteristik birokrasi yaitu:
 - 1) Birokrasi diciptakan sebagai instrumen dalam menangani keperluan-keperluan publik (*public affair*).
 - 2) Birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam implementasi kebijakan publik yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap hierarkinya.
 - 3) Birokrasi mempunyai sejumlah tujuan yang berbeda.
 - 4) Fungsi birokrasi berada dalam lingkungan yang kompleks dan luas.
 - 5) Birokrasi mempunyai naluri bertahan hidup yang tinggi dengan begitu jarang ditemukan birokrasi yang mati.
 - 6) Birokrasi bukan kekuatan yang netral dan tidak dalam kendali penuh dari pihak luar.

Faktor-faktor yang menjadi perhatian menurut Agustinus (2006:159-160)

dalam implementasi kebijakan terdiri dari:

- 1) Pengangkatan birokrasi. Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.
- 2) Insentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli yang dikemukakan di atas, maka dapat disampaikan bahwa suatu implementasi kebijakan publik maka perlu diketahui variabel dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk itu, diperlukan suatu model kebijakan guna menyederhanakan pemahaman konsep suatu implementasi kebijakan.

2.2.2.4 Unsur yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Dalam proses implementasi kebijakan selain terdapat empat variabel yang menentukan keberhasilan dalam implementasi kebijakan seperti yang dikemukakan Edward III (dalam Wibawa, 2014:19), harus terdapat pula unsur-unsur yang penting dan mutlak yaitu :

1. Kebijakan / program
Isi suatu kebijakan harus menegaskan standar dan tujuan tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan. Hal ini perlu adanya ketegasan oleh karena kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan tujuan. Selanjutnya mengenai metode dan prosedur yang harus ditempuh dalam menyelesaikan suatu pekerjaan dalam mencapai tujuan harus jelas sehingga pelaksana akan mudah memahami dan melaksanakannya.
2. Target Group
Target group yaitu sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang perilaku atau keadaannya ingin dipengaruhi oleh kebijakan. Adapun sampai berapa jauh mereka dapat mematuhi/menyesuaikan diri terhadap kebijakan yang diimplementasikan selain bergantung pada kesesuaian ini kebijakan dengan harapan mereka akan bergantung pula pada karakteristik yang dimiliki oleh mereka (kelompok sasaran), yang sebagian dipengaruhi oleh lingkungan dimana mereka hidup baik secara geografis maupun secara sosial budaya.
3. Unsur Pelaksana
Ada dua aspek dari organisasi sebagai pelaksana yang mempengaruhi keberhasilan yaitu : Struktur dan proses organisasi. Aspek struktur menunjukkan hubungan formal antara peranan dan tugas yang harus dilaksanakan agar mendukung terhadap kelancaran implementasi program atau kebijakan. Struktur organisasi ini harus dibuat sedemikian rupa sehingga permasalahan pembagian berbagai kegiatan tertampung dengan baik. Selanjutnya mengenai proses organisasi, hal ini menunjukkan mekanisme kerja dalam mengkoordinasikan, mempengaruhi dan mengawasi kegiatan.

Selanjutnya Tachjan (2006:28) menjelaskan tentang unsur-unsur dari implementasi kebijakan yang mutlak dan harus ada, yaitu:

1. Unsur pelaksana
Unsur pelaksana adalah implementor kebijakan. Pelaksanaan kebijakan merupakan pihak-pihak yang menjalankan kebijakan yang terdiri dari penentuan tujuan dan sasaran organisasional, analisis serta perumusan kebijakan dan strategi organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan program, pengorganisasian, penggerakan manusia, pelaksanaan operasional, pengawasan serta penilaian.
2. Adanya Program Yang Dilaksanakan
Suatu kebijakan publik tidak mempunyai arti penting adanya tindakan yang nyata dilakukan dengan berbagai program atau kegiatan. Program atau kegiatan merupakan rencana yang

komprehensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang digunakan dan terpadu dalam satu kesatuan.

3. Target Group Atau Kelompok Sasaran

Target group atau kelompok sasaran adalah sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang atau jasa yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli yang dikemukakan di atas, maka dapat disampaikan bahwa terdapat unsur-unsur keberhasilan implementasi suatu kebijakan yang dapat dilihat dan dicermati dari sudut kemampuan nyata dalam meneruskan berbagai program-program sebagaimana direncanakan sebelumnya. Oleh karena itu sebaiknya suatu kebijakan harus bersentuhan langsung dengan kebutuhan dan kepentingan kelompok atau individu yang menjadi sasaran, sehingga manfaat dapat dirasakan sesuai dengan tujuan dari kebijakan publik dimaksud.

2.2.3 Lahan Pertanian

Lahan pertanian menurut Harsono, (2018:269) adalah:

Merupakan tanah yang digunakan untuk usaha pertanian yang selain sebagai persawahan dan tegalan juga semua tanah perkebunan, tambak untuk perikanan tanah tempat penggembalaan ternak, tanah belukar bekas ladang dan hutan yang menjadi tempat mata pencaharian bagi yang berhak.

Lebih jauh Harsono, (2018:269) mengatakan:

Lahan merupakan sumber memproduksi makanan dan keberlangsungan hidup. Bagi pihak swasta, lahan adalah aset untuk mengakumulasikan modal, bagi pemerintah, lahan merupakan kedaulatan suatu negara dan untuk kesejahteraan rakyatnya. Adanya banyak kepentingan yang saling terkait dalam penggunaan lahan, hal ini mengakibatkan terjadinya tumpang tindih kepentingan antar aktor yaitu petani, pihak swasta, dan pemerintah dalam memanfaatkan lahan. Lahan pertanian merupakan lahan yang diperuntukan untuk kegiatan pertanian. Sumber daya lahan pertanian memiliki banyak manfaat bagi manusia.

Sumaryanto dan Tahlim, (2018:65) menyebutkan bahwa:

Manfaat lahan pertanian dapat di bagi menjadi dua kategori. Pertama, *use values* atau nilai penggunaan dapat pula disebut sebagai *personal use values*. Manfaat ini dihasilkan dari hasil eksploitasi atau kegiatan usaha tani yang dilakukan pada sumber daya lahan pertanian. Kedua, *non use values* dapat pula disebut sebagai *intrinsic values* atau manfaat bawaan.

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Pasal 5, Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang ditetapkan sebagai lahan pangan berkelanjutan dapat berupa :

1. Lahan irigasi
2. Lahan reklamasi rawa pasang surut dan non pasang surut
3. Lahan tidak beririgasi

Rustiadi dan Reti, (2012) dalam (Marliani,2020:76) tersedianya sumber daya lahan pertanian pangan yang berkelanjutan merupakan syarat untuk ketahanan pangan nasional. Ketersedian lahan pertanian pangan berkaitan erat dengan beberapa hal :

- 1) Potensi sumber daya lahan pertanian pangan,
- 2) Produktivitas lahan,
- 3) Fragmentasi lahan pertanian
- 4) Skala luasan penguasaan lahan pertanian,
- 5) Sistem irigasi,
- 6) *Land rent* lahan pertanian,
- 7) Konversi,
- 8) Pendapatan petani,
- 9) Kapasitas SDM pertanian serta
- 10) Kebijakan di bidang pertanian

Berdasarkan beberapa pendapat ahli diatas dapat penulis ungkapkan bahwa Penetapan lahan pertanian abadi merupakan salah satu opsi kebijakan yang oleh sebagian pihak dianggap paling tepat untuk mencegah proses alih fungsi lahan pertanian. Pada dasarnya lahan pertanian abadi adalah penetapan suatu kawasan sebagai daerah konservasi, atau perlindungan, khusus untuk usaha pertanian.

2.2.4 Perlindungan Lahan Pertanian

Menurut Sabiham, (2015) dalam (Marliani,2020:77) pertanian berkelanjutan adalah:

Pengelolaan sumber daya untuk menghasilkan kebutuhan pokok manusia, yaitu sandang, pangan dan papan, sekaligus mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan dan melestarikannya. Definisi tersebut mencakup hal-halsebagai berikut: mantap secara ekologis, bisa berlanjut secara ekonomis, adil, manusiawi dan luwes.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah:

Bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Sedangkan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sendiri diartikan sebagai sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan memanfaatkan dan membina, mengendalikan dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.

2.2.5 Pangan Berkelanjutan

Marliani, (2020:77) mengungkapkan Pangan adalah :

Kebutuhan manusia yang paling dasar dari beberapa hak asasi manusia. Pengertian pangan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman. Ketahanan pangan merupakan suatu sistem ekonomi pangan yang terintegrasi.

Pada BAB II Pasal 2 dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. Manfaat;
- b. Keberlanjutan dan Konsisten;
- c. Keterpaduan;
- d. Keterbukaan dan Akuntabilitas;
- e. Kebersamaan dan Gotong-Royong;
- f. Partisipatif;
- g. Keadilan;
- h. Keserasian, Keselarasan, dan Keseimbangan;
- i. Kelestarian Lingkungan dan Kearifan Local;
- j. Desentralisasi; Tanggung Jawab Negara;
- k. Keragaman: dan
- l. Sosial dan Budaya;

2.2.6 Pengertian Ketahanan Pangan

Pangan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah

maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman

Ketahanan Pangan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Berikut adalah beberapa definisi ketahanan pangan menurut Hanani (dalam Purwaningsih, 2011:5) :

- 1) Undang-Undang Pangan No.7 Tahun 1996, kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.
- 2) USAID (1992), kondisi ketika semua orang pada setiap saat mempunyai akses secara fisik dan ekonomi untuk memperoleh kebutuhan konsumsinya untuk hidup sehat dan produktif.
- 3) FAO (1997), situasi dimana semua rumah tangga mempunyai akses baik fisik maupun ekonomi untuk memperoleh pangan bagi seluruh anggota keluarganya, dimana rumah tangga tidak beresiko mengalami kehilangan kedua akses tersebut.
- 4) FIVIMS (2005), kondisi ketika semua orang pada segala waktu secara fisik, social dan ekonomi memiliki akses pada pangan yang cukup, aman dan bergizi untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi dan sesuai dengan selernya (*food preferences*) demi kehidupan yang aktif dan sehat.
- 5) Mercy Corps (2007), keadaan ketika semua orang pada setiap saat mempunyai akses fisik, sosial, dan ekonomi terhadap terhadap kecukupan pangan, aman dan bergizi untuk kebutuhan gizi sesuai dengan selernya untuk hidup produktif dan sehat.

Adanya ketahanan pangan maka diharapkan masyarakat dapat mewujudkan kemandirian pangan, dimana arti kemandirian pangan itu sendiri

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2012 adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup di tingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.

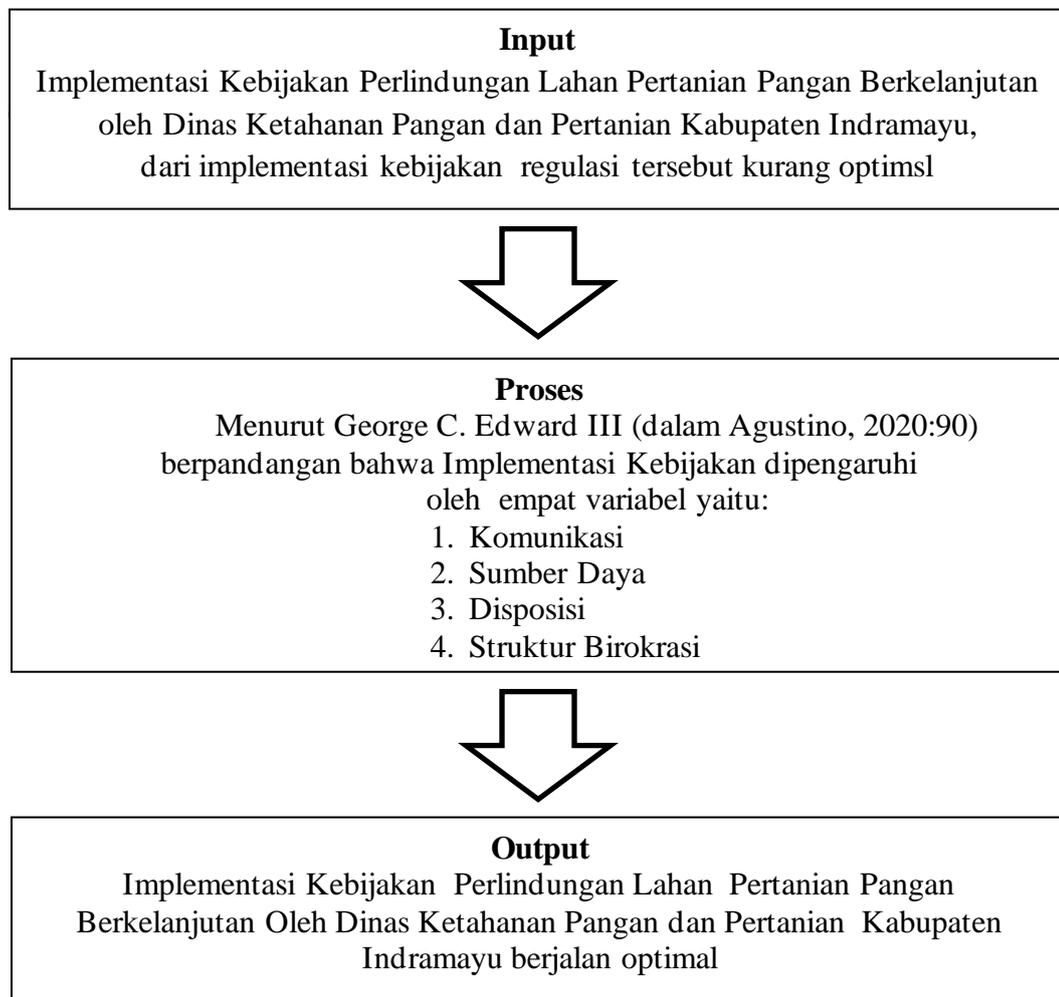
2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini di latar belakang dari adanya permasalahan Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Oleh Dinas Ketahanan Pangan Oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu.

Menurut George C. Edward III (dalam Agustino, 2020:90) berpandangan bahwa Implementasi Kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yaitu:

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi/ Sikap dari pelaksana
4. Struktur Birokrasi

Dengan melihat uraian diatas, maka selanjutnya peneliti menggambarkan alur pemikiran sebagai berikut :

GAMBAR 2.1**Kerangka Pemikiran/Alur Pemikiran**

Sumber : Hasil Penelitian

2.4 Proposisi

Berdasarkan dari uraian latar belakang dan perumusan masalah setelah dihubungkan dengan kerangka pemikiran diatas maka dapat dirumuskan suatu proposisi yaitu Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu ditentukan oleh Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Menurut Silalahi (2012:9) menyatakan bahwa yang dikatakan penelitian ilmiah adalah sebagai berikut :

Penelitian ilmiah adalah penyelidikan yang sistematis, terkontrol, empiris, dan kritis tentang fenomena-fenomena alami dengan dipandu oleh teori dan hipotesis-hipotesis tentang hubungan yang diduga terdapat fenomena-fenomena itu. Penelitian ilmiah merupakan cara yang tepat untuk menemukan solusi suatu masalah dan untuk mendapatkan pengetahuan.

Dalam penelitian ini peneliti mencocokkan antara realita empiris dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif. Menurut Keirl dan Miller dalam (Moleong, 2013:11) yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah “tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan, manusia, kawasannya sendiri, dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya”.

Dengan demikian metode kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan menguraikan secara deskriptif berdasarkan hasil analisa data yang telah dilakukan.

3.2 Operasionalisasi Konsep

Operasionalisasi konsep adalah mengubah *abstract item* menjadi *empirical item* dengan maksud untuk menghubungkan teori dengan fakta (Silalahi Ulber).

Menurut George C. Edward III (dalam Agustino, 2020:154-158), Implementasi Kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel antara lain komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Adapun empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan menurut George C. Edward III (dalam Agustino, 2020:154), yaitu :

1. Komunikasi :
 - a. Adanya komunikasi yang baik dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kepada masyarakat tentang proses Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
 - b. Adanya sosialisasi oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kepada Masyarakat tentang proses Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
 - c. Adanya komunikasi yang konsisten oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kepada masyarakat tentang proses Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

2. Sumber Daya :

- a. Adanya sumber daya manusia di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang kompeten dalam proses Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- b. Adanya kewenangan yang bersifat formal dan kuat agar perintah dilaksanakan.
- c. Adanya fasilitas fisik dalam proses Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

3. Disposisi :

- a. Adanya komitmen yang bertanggung jawab terhadap jalannya proses implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
- b. Adanya pembagian kerja sesuai dengan kemampuan petugas dalam Implementasi kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- c. Adanya transparansi antara Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dengan Pemerintah, pihak swasta maupun Masyarakat.

4. Struktur Birokrasi :

- a. Adanya struktur organisasi yang menguasai tupoksinya.
- b. Adanya rasa saling memotivasi dan membangun oleh pelaksana kebijakan.

3.3 Data dan Sumber Data

3.3.1 Data

Menurut Silalahi Ulber, (2018:280), Data adalah:

Merupakan bahan penting yang digunakan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan atau menguji hipotesis/proposisi dan mencapai tujuan penelitian. Oleh karena itu data dan kualitas data merupakan pokok penting dalam penelitian karena menentukan kualitas penelitian.

3.3.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder, menurut Silalahi Ulber (2018:289), mengemukakan bahwa “data bersumber dari dalam organisasi yang dinamakan sumber data atau data item dan dari luar organisasi yang dinamakan sumber data ekstem”. Sumber data (*ekstem*) dibedakan atas sumber data primer (*primary data*) dan sumber data sekunder (*secondary data*).

1. Data primer adalah suatu objek atau dokumen original-material dari pelaku yang disebut “*firs-hand informantion*”. Data yang dikumpulkan dari situasi aktual ketika peristiwa terjadi dinamakan data primer.
2. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan.

Data yang dilakukan melalui sumber-sumber lain yang tersedia dinamakan data sekunder. Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber data sekunder diperoleh dari berbagai literatur yang relevan dengan judul penelitian seperti buku-buku, jurnal, peraturan-peraturan, dan lain-lain yang memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti.

Adapun sumber data yang dipakai oleh penulis untuk melengkapi data tersebut adalah :

a. Informan penelitian

Dalam penelitian kualitatif berkaitan dengan bagaimana langkah yang ditempuh peneliti agar data dan informasi dapat diperolehnya.

Informan yaitu orang yang memberikan informasi terkait masalah yang sedang diteliti oleh peneliti. Dalam penelitian ini yang menjadi informan sebanyak 8 orang, yaitu :

Kepala Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian	: 1 orang
Kepala Staf Bagian Rehabilitasi	
Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman Pangan	: 1 orang
Kepala Balai Penyuluh Pertanian	: 3 orang
<u>Kelompok Tani</u>	<u>: 3 orang</u>
Jumlah	: 8 orang

b. Dokumen

Pada umumnya data yang tercantum dalam berbagai jenis dokumen itu merupakan satu-satunya alat untuk mempelajari permasalahan tertentu, adapun dokumen yang dipakai oleh peneliti yaitu berupa tulisan, buku, laporan, artikel, jurnal, peraturan-peraturan dan lain sebagainya yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Maksudnya yaitu untuk mengetahui tentang bagaimana hasil dari Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Silalahi Ulber (2018:280), “pengumpulan data adalah sebagai satu proses mendapatkan data empiris melalui responden dengan menggunakan metode tertentu”. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Studi Kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan mempelajari berbagai literatur dan bahan pustaka lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.
2. Studi Lapangan, yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian dengan cara. *Pertama*, Survei menurut Silalahi Ulber (2018:293), adalah usaha untuk mengumpulkan data dari anggota populasi mengenai satu atau lebih fenomena. *Kedua*, Wawancara menurut Silalahi Ulber (2018:312), adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data atau keterangan lisan dari seseorang yang disebut responden melalui suatu percakapan yang sistematis dan terorganisir.

3.5 Teknik Pengolahan/Analisis Data

Analisis data dalam metode kualitatif menurut Silalahi Ulber (2018:322), adalah proses penyederhanaan data dan penyajian data dengan pengelompokannya dalam suatu bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasi. Analisis data mempunyai dua tujuan, yakni meringkas dan menggambarkan data (*to summarize and describe the data*) dan membuat inferensi dari data untuk populasi dari mana sampel ditarik (*to make inferences from the data to the population from which the sample was drawn*). Analisis berarti ategorisasi, penataan, manipulasi dan peringkasan data untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian.

Analisis data dalam penelitian kualitatif, merupakan proses penyusunan data agar dapat ditafsirkan dan dapat diketahui makna. Dalam penelitian ini, analisis data penulis lakukan sesuai dengan pendapat menurut Miles dan Huberman (dalam Silalahi Ulber, 2018:339), sebagai berikut :

1. Reduksi data, yaitu dapat diartikan sebagai pemilihan, pemutusan, perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.
2. Display data (penyajian data), yaitu langkah berikutnya setelah reduksi data berlangsung adalah penyajian data, sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
3. Verifikasi dan Penarikan kesimpulan, dimaknai sebagai penarikan arti data yang telah disampaikan. Pemberian makna ini tentu saja sejah pemahaman peneliti dan interpretasi yang dibuatnya.

3.6 Jadwal Penelitian

Lamanya penelitian yang peneliti lakukan pada penelitian ini yaitu kurang lebih 8 Bulan, terhitung mulai dari Bulan November 2021 sampai dengan Bulan Juni 2022. Dan tempat penelitian yaitu di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Indramayu, Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari tabel dibawah ini.

TABEL. 3.1

Jadwal Penelitian Tahun 2021/2022

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan							
		Tahun 2021		Tahun 2022					
		Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
1	Penjajagan								
2	Studi Kepustakaan								
3	Seminar Proposal								
4	Penyusunan Skripsi								
5	Sidang Skripsi								

Sumber : Hasil Penelitian 2022

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu terletak di Jalan Veteran No. 1 Lemahabang Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu ini merupakan dinas urusan pemerintahan yang bergerak di bidang ketahanan pangan dan pertanian. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu merupakan gabungan antara tiga dinas yaitu Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, dan Dinas peternakan dan Kesehatan Hewan.

Adapun tugas, fungsi sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Bupati Indramayu No. 10 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu yaitu membantu Bupati dalam urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang pangan dan pertanian.

Untuk menyelenggarakan tugas Dinas Mempunyai Fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan teknis di bidang pangan dan bidang pertanian
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pangan dan bidang pertanian
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pangan dan bidang pertanian
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang pangan dan bidang pertanian
- e. Pelaksanaan pengelolaan UPTD

- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

4.1.1 Visi Misi dan Tujuan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dengan demikian visi merupakan gambaran keadaan masa depan yang ingin dicapai serta merupakan pandangan yang kuat mengarah kedepan yang memberi keyakinan bahwa suatu perkembangan akan terjadi atau suatu kondisi ideal tentang masa depan yang realistis, dapat dipercaya, meyakinkan, mengandung daya tarik, serta mendorong motivasi. Sehubungan dengan hal tersebut maka visi misi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu adalah :

Visi

Terwujudnya Indramayu Bermartabat : Bersih, Religius, Maju, Adil, Makmur, dan Hebat.

Misi

1. Meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, melindungi, transparan, akuntabel, profesional serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dengan kata kunci Perwujudan Reformasi Birokrasi

2. Meningkatkan pelayanan kehidupan beragama dan kepercayaan serta perwujudan kebudayaan dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika dengan kata kunci Fasilitas Kehidupan Beragama dan Bermasyarakat
3. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan dalam jumlah dan kualitas yang memadai dan merata. Dengan kata kunci Peningkatan Kesejahteraan
4. Meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan sumber daya, sehingga mampu berdikari. Dengan kata kunci Penanggulangan Kemiskinan
5. Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dengan kata kunci Peningkatan Daya Saing SDM
6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan efektivitas penataan ruang yang berwawasan lingkungan hidup. Dengan kata kunci Peningkatan Infrastruktur
7. Meningkatkan daya saing ekonomi dan daya saing melalui pengelolaan potensi unggulan daerah. Dengan kata kunci Peningkatan Ekonomi dan Daya Saing Daerah

4.1.2 Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu

Setiap organisasi apapun selalu mempunyai tujuan yang merupakan landasan bagi organisasi yang akan dijadikan pedoman pokok dalam mengambil

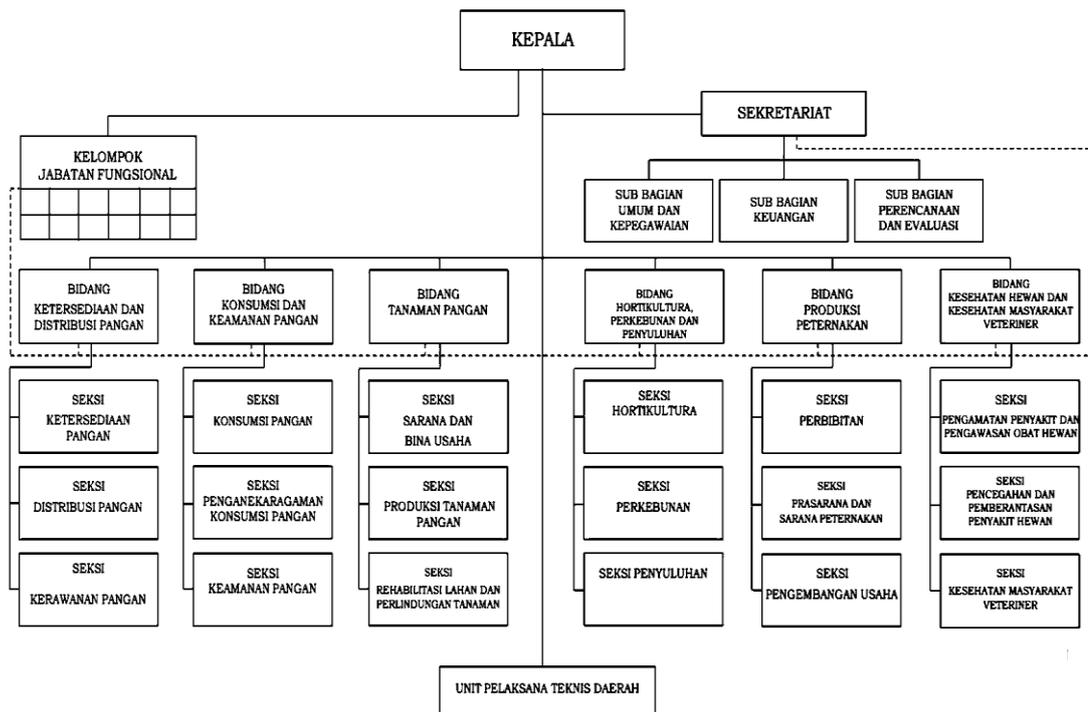
kebijakan. Tujuan tersebut dapat tercapai apabila terjalin kerjasama yang baik antar sesama anggota organisasi dan penentuan tugas serta tanggung jawab yang jelas dari masing-masing anggota sesuai dengan keahliannya yang tergambar jelas dalam struktur organisasi.

Berdasarkan Peraturan Bupati Indramayu No. 10 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu, maka struktur organisasi DKPP adalah sebagai berikut

GAMBAR 4.1

Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten

Indramayu



Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

- a. Kepala
- b. Sekertariat, membawahkan :
 - 1. Sub bagian umum dan kepegawaian
 - 2. Sub bagian keuangan
 - 3. Sub bagian perencanaan dan evaluasi
- c. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, membawahkan :
 - 1. Seksi ketersediaan pangan
 - 2. Seksi distribusi pangan
 - 3. Seksi kerawanan pangan
- d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahkan :
 - 1. Seksi konsumsi pangan
 - 2. Seksi kenganekaragaman konsumsi pangan
 - 3. Seksi keamanan pangan
- e. Bidang Tanaman Pangan, membawahkan :
 - 1. Seksi sarana dan bina usaha
 - 2. Produksi tanaman pangan
 - 3. Seksi rehabilitasi lahan dan perlindungan tanaman
- f. Bidang hortikultura, Perkebunan dan Penyuluhan, membawahkan :
 - 1. Seksi hortikuluta
 - 2. Seksi Perkebunan
 - 3. Seksi Penyuluhan
- g. Bidang Produksi Peternakan, membawahkan :
 - 1. Seksi perbibitan

2. Seksi prasarana dan sarana peternakan
3. Seksi pengembangan usaha
- h. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veternier, membawahkan :
 1. Seksi pengamatan dan pengawasan obat hewan
 2. Seksi pencegahan dan pembrantasan penyakit hewan
 3. Seksi kesehatan masyarakat veternier
- i. UPTD
- j. Kelompok jabatan fungsional

4.1.3 Data Ketersediaan Peralatan dan Pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu

Di dalam instansi pemerintahan perlu adanya fasilitas dan pegawai yang mumpuni untuk menunjang kinerja dan kualitas pegawai. Berikut adalah data ketersediaan peralatan dan pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu :

TABEL 4.1

Data Pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Petanian Kabupaten Indramayu Berdasarkan Tingkat Pendidikan (Desember 2021)

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SD	2
2	SLTP	-
3	SLTA	106
4	Diploma III	4

5	D IV dan Strata I	162
6	Strata II	9
7	Strata III	1
Jumlah		282

Sumber : Rencana Strategis DKP dan Pertanian 2021-2026

Berdasarkan tabel 4.1 di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar Pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu Berdasarkan Tingkat Pendidikan yaitu Strata I sebanyak 162 orang dan terdapat pendidikan SD yang berjumlah 2 orang. Dengan demikian dapat Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu memiliki pegawai dengan tingkat pendidikan yang baik.

TABEL 4.2

Data PNS Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu

Berdasarkan Golongan Pegawai (Mei 2021)

No	Golongan Pegawai	Jumlah
1	I/a	2
	I/b	-
	Ic	-
	I/d	-
2	II/a	16
	II/b	3
	II/c	16
	II/d	13
3	III/a	47
	III/b	52

	III/c	33
	III/d	38
4	IV/a	21
	IV/b	12
	IV/c	12
	IV/d	1
5	P3K	49
6	PTT	69
Jumlah		384

Sumber : Rencana Strategis DKP dan Pertanian 2021-2026

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa sebagian besar PNS Dinas Ketahanan Pangan dan Petanian Kabupaten Indramayu Berdasarkan Golongan Pegawai dengan golongan pegawai terbanyak adalah P3K dan dari Golongan Pegawai III.

TABEL 4.3

**Data Sarana dan Prasarana Dinas Ketahanan Pangan dan Petanian
Kabupaten Indramayu**

No	Sarana dan Prasarana
1	Gedung Kantor
2	Gedung BPP
3	Gedung Balai Benih
4	Gedung Rumah Dinas
5	Gedung RPH
6	Gedung PUSKESWAN
7	Kendaraan dinas
	Roda 2/4

	Alat Dinas dan Rumah Tangga
--	-----------------------------

Sumber : Rencana Strategis DKP dan Pertanian 2021-2026

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa Data Sarana dan Prasarana Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu memiliki fasilitas yang lengkap guna menunjang pelayanan.

4.1.4 Karakteristik Informan

4.1.4.1 Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

Karakteristik informan berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini.

TABEL 4.4

KARAKTERISTIK INFORMAN BERDASARKAN JENIS KELAMIN

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	12
2	Perempuan	2
Jumlah		14

Sumber : Hasil Penelitian 2022

Berdasarkan tabel 4.4 di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar informan berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah 12 informan dan 2 informan berjenis kelamin perempuan. Hal ini dapat diartikan bahwa dalam proses Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan membutuhkan fisik yang kuat karena lebih banyak bekerja di lapangan.

4.1.4.2 Karakteristik Informan Berdasarkan Usia

Karakteristik informan berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini.

TABEL 4.5

KARAKTERISTIK INFORMAN BERDASARKAN USIA

No	Usia	Jumlah
1	20-30	-
2	31-40	2
3	41-50	4
4	50-60	2
Jumlah		8

Sumber : Hasil Penelitian 2022

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui bahwa mayoritas informan berusia 41-50 tahun. Hal ini dapat diartikan bahwa informan dapat memberikan jawaban yang lebih tepat karena sudah berpengalaman dalam bidang pertanian. Sedangkan tidak ada informan yang berusia 20-30 tahun. Hal ini dapat diartikan bahwa minat dalam bidang pertanian pada kalangan muda yang kurang.

4.1.4.3 Karakteristik Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Karakteristik informan berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

TABEL 4.6
KARAKTERISTIK INFORMAN BERDASARKAN TINGKAT
PENDIDIKAN

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SD	2
2	SLTA	2
3	Diploma III	-
4	Strata 1	4
5	Strata 2	-
6	Strata 3	-
Jumlah		8

Sumber : Hasil Penelitian 2022

Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui bahwa dari 8 informan terdapat strata 1 yang berjumlah 4 orang dari Dinas ketahanan Pangan dan Pertanian dan Balai Penyuluh Pertanian, 2 orang informan SD, dan 2 orang informan SLTA. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam proses penerapan kebijakan sudah cukup dalam penerapan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

4.1.4.4 Karakteristik Informan Berdasarkan Jabatan

Karakteristik informan berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini.

TABEL 4.7

KARAKTERISTIK INFORMAN BERDASARKAN JABATAN

No	Jabatan	Jumlah
1	Sekretari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1
2	Kepala Seksi Rehabilitasi Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman Pangan	1
3	Kepala Balai Penyuluh Pertanian	3
4	Kelompok Tani	9
Jumlah		14

Sumber : Hasil Penelitian 2022

Berdasarkan tabel 4.7 dapat diketahui bahwa mayoritas informan yaitu kelompok tani dengan jumlah 9 orang. Karena kelompok tani mewakili masyarakat. Untuk kepala Balai Penyuluh Pertanian 3 orang yaitu kepala Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Indramayu yang merupakan kota, Kecamatan Cikedung merupakan Kecamatan yang berada di tengah bawah Kabupaten Indramayu dan Kecamatan Sukra merupakan Kecamatan yang berada di bagian paling barat Kabupaten Indramayu.

4.1.5 DESKRIPSI HASIL PENELITIAN

4.1.5.1 Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu

Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu peneliti telah menentukan informan sebanyak 8 orang yang terdiri dari Sekertaris Dinas 1 orang, Kepala Seksi Rehalintan 1 orang, Kepala Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Indramayu 1 orang, Kepala Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Cikedung 1 orang, Kepala Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Sukra 1 orang, Kelompok Tani Kecamatan Indramayu 1 orang, Kelompok Tani Kecamatan Cikedung 1 orang, dan Kelompok Tani Kecamatan Sukra 1 orang. Peneliti telah melakukan wawancara dengan 8 orang informan untuk mendapatkan informasi mengenai Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu. Berikut adalah daftar informan dapat dilihat dari tabel berikut ini :

TABEL 4.8

Daftar Informan

No	Informan	Keterangan Informan
1	Informan 1	Sekertaris DKPP Indramayu
2	Informan 2	Seksi REHALINTAN DKPP Indramayu
3	Informan 3	Kepala BPP Kecamatan Indramayu
4	Informan 4	Kepala BPP Kecamatan Cikedung

5	Informan 5	Kepala BPP Kecamatan Sukra
6	Informan 6	Kelompok Tani Kecamatan Indramayu
7	Informan 7	Kelompok Tani Kecamatan Cikedung
8	Informan 8	Kelompok Tani Kecamatan Sukra

Sumber : *Hasil Penelitian 2022*

Pada bagian ini peneliti akan menjelaskan hasil wawancara dengan informan tersebut mengenai bagaimana Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu, hambatan-hambatan serta bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk menangani hambatan tersebut.

Hasil wawancara tersebut akan diuraikan sesuai dengan fokus penelitian mengenai dimensi-dimensi Implementasi Kebijakan Menurut George C. Edward III (dalam Agustino, 2020:90) yaitu sebagai berikut :

1. Komunikasi

g. Komunikasi yang baik dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kepada masyarakat tentang proses Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Untuk mengetahui bagaimana komunikasi yang baik dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kepada masyarakat tentang proses Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Hasil wawancara ini dikatakan oleh Sekertaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu yaitu :

“Dari dinas sudah dan selalu melakukan komunikasi terkait perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan pertama kepada Balai Penyuluh Pertanian untuk kemudian hal tersebut di komunikasikan kembali kepada masyarakat”

Kemudian menurut kepala seksi Rehabilitasi Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman Pangan di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Komunikasi kepada masyarakat di laksanakan oleh penyuluh pertanian lapangan, karena dari dinas kordinasinya kepada kepala Balai Penyuluh Pertanian, kepada kodinaator penyuluh pertanian terkait LP2B”

Kemudian menurut kepala Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Komunikasi dari Dinas sudah baik terkait LP2B kepada petugas Penyuluh Pertanian, tapi untuk ke masyarakat memang belum di sampaikan”

Kemudian menurut kepala Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Dari Dinas sendiri komunikasi sudah berjalan kepada Penyuluh kemudian disampaikan kembali kepada masyarakat”

Kemudian menurut kepala Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Kalau dari informasi atau untuk komunikasi terkait hal tersebut tidak ada masalah, komunikasi dari pusat disampaikan kepada dinas kemudian kepada penyuluh kemudian kepada masyarakat”

Kemudian menurut Kelompok Tani Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Tidak ada komunikasi terkait hal tersebut. Komunikasi hanya berkaitan tentang obat untuk hama”

Kemudian menurut Kelompok Tani Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Kalau masalah komunikasi, kurang berjalan”

Kemudian menurut Kelompok Tani Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Perbedaan pemerintah sekarang dengan yang dulu itu berbeda. Pada masa orde baru itu informasi dari pemerintah berjalan dengan konsisten segala sesuatu disampaikan kepada masyarakat, seperti jadwal tanam, pengolahan tanah, jadwal masuknya air. Kalau sekarang petani itu berjalan sendiri. Sehingga masyarakat tidak mengetahui informasi”

Dari hasil wawancara mayoritas informan mengatakan untuk komunikasi dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kepada Badan Penyuluh Pertanian sudah baik tapi dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan Balai Penyuluh Pertanian kepada masyarakat masih kurang.

Berdasarkan hasil observasi tersebut terkait komunikasi yang baik dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kepada masyarakat tentang proses

Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan belum berjalan maksimal. Masih ada kesenjangan komunikasi dari pihak Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Balai Penyuluh Pertanian kepada masyarakat, sehingga mayoritas informan kurang mengetahui tentang Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi tersebut dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang baik dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kepada masyarakat tentang proses Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Hasil wawancara ini dikatakan oleh Sekertaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu tidak berjalan maksimal sehingga komunikasi dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan Balai Penyuluh Pertanian ke kelompok tani terdapat miskomunikasi

h. Bagaimana sosialisasi oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kepada masyarakat tentang proses Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Untuk mengetahui bagaimana sosialisasi oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kepada masyarakat tentang proses Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Hasil wawancara ini dikatakan oleh Sekertaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu yaitu :

“Dari dinas sudah melakukan komunikasi kepada Balai Penyuluh Pertanian di setiap kecamatan untuk mensosialisasikan bagaimana melindungi lahan pertanian”

Kemudian menurut kepala seksi Rehabilitasi Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman Pangan di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“kita dari dinas memang sudah mensosialisasikan bahwa kita ada LP2B dan kita sosialisasinya melalui Balai Penyuluh Pertanian”

Kemudian menurut kepala Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Sudah ada sosialisasi terkait LP2B”

Kemudian menurut kepala Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Dari dinas sudah melakukan sosialisasi kepada kita Balai Penyuluh Pertanian”

Kemudian menurut kepala Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Badan Penyuluh Pertanian Kecamatan Sukra beserta pihak desa maupun pihak kecamatan sudah mensosialisasikan kepada masyarakat”

Kemudian menurut Kelompok Tani Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Sosialisasi untuk perlindungan lahan pertanian ada, tapi masih banyak masyarakat yang belum mengetahui”

Kemudian menurut Kelompok Tani Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Komunikasi dan sosialisasi memang sudah ada, tapi terkait perlindungan lahan pertanian masih kurang”

Kemudian menurut Kelompok Tani Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Untuk LP2B memang ada, tapi kurang tersampaikan kepada masyarakat”

Dari hasil wawancara mayoritas informan mengatakan untuk sosialisasi dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kepada Balai Penyuluh Pertanian sudah baik tapi dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Badan Penyuluh Pertanian kepada masyarakat masih kurang.

Berdasarkan hasil observasi terkait sosialisasi oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kepada masyarakat tentang proses Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan belum berjalan maksimal. Masih ada kesenjangan komunikasi dari pihak Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Balai Penyuluh Pertanian kepada masyarakat, sehingga mayoritas informan kurang mengetahui tentang Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi tersebut dapat disimpulkan bahwa sosialisasi oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kepada masyarakat tentang proses Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan masih kurang sehingga masyarakat masih kekurangan informasi dan permasalahan yang terjadi di lapangan belum dapat diselesaikan.

i. Komunikasi yang konsisten oleh Dinas Ketahanan Pangan dan pertanian kepada masyarakat tentang proses Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Untuk mengetahui bagaimana komunikasi yang konsisten oleh Dinas Ketahanan Pangan dan pertanian kepada masyarakat. tentang proses Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Hasil wawancara ini dikatakan oleh Sekertaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu yaitu :

“Tentu dari dinas selalu berkomunikasi secara terus menerus kepada seluruh komponen agar terlaksananya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan”

Kemudian menurut kepala seksi Rehabilitasi Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman Pangan di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Dari dinas sudah pasti konsisten untuk menyampaikan LP2B”

Kemudian menurut kepala Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Tentu saja konsisten dari dinas kepada penyuluh dan kita dari badan penyuluh pertanian juga terus menyampaikan ketika kita terjun ke lapangan”

Kemudian menurut kepala Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Tentu dari dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sudah sangat konsisten dalam melakukan komunikasi dan kita sebagai penyuluh pertanian juga terus melakukan komunikasi kepada masyarakat”

Kemudian menurut kepala Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Komunikasi kita lakukan secara konsisten melibatkan pihak pemerintah desa dan masyarakat seperti rapat mingguan atau bulanan”

Kemudian menurut Kelompok Tani Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Memang seharusnya komunikasi dilakukan secara terus menerus”

Kemudian menurut Kelompok Tani Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Untuk komunikasi dari dinas sudah konsisten”

Kemudian menurut Kelompok Tani Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Komunikasi masih belum konsisten”

Dari hasil wawancara mayoritas informan mengatakan untuk komunikasi yang konsisten dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kepada Badan Penyuluh Pertanian dan kepada masyarakat belum berjalan sehingga masih banak informasi-informasi yang tidak sampai kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi mayoritas informan terkait komunikasi yang konsisten oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kepada masyarakat tentang proses Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sudah berjalan baik. Tapi masih ada masyarakat yang belum merasa mendapatkan informasi tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi tersebut dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang konsisten oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kepada masyarakat tentang proses Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan belum berjalan secara konsisten. ini berdampak pada masyarakat yang kurang mendapatkan informasi.

Berdasarkan hasil uraian tiap indikator dari variabel komunikasi dapat disajikan bahwa Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu memiliki komunikasi yang baik dan berjalan tapi masih ada kesenjangan antara pihak Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Balai Penyuluh Pertanian dengan masyarakat, dimana masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

2. Sumber Daya

a. Sumber daya manusia yang kompeten dalam proses Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Untuk mengetahui bagaimana sumber daya manusia yang kompeten dalam proses Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Hasil wawancara ini dikatakan oleh Sekertaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu yaitu :

“Di DKPP ini gabungan dari tiga dinas, tentu sumber daya manusianya tentu kemampuan sudah sesuai dengan bidangnya”

Kemudian menurut kepala seksi Rehabilitasi Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman Pangan di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Untuk SDA sendiri sudah ditentukan oleh BKPSDM. Tetapi jika ada yang kurang dalam SDM kita dapat mengajukan sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan”

Kemudian menurut kepala Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Kalau dari dinas sudah sesuai, artinya memiliki sumber daya manusia yang kompeten”

Kemudian menurut kepala Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Di DKPP kabupaten Indramayu SDMnya sangat baik dalam kaitannya perlindungan lahan pertanian”

Kemudian menurut kepala Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Sumber daya manusia dalam proses pembenahan masalah alih fungsi lahan sudah baik. Memiliki orang-orang yang kompeten dalam bidang tersebut”

Kemudian menurut Kelompok Tani Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Sumber daya manusia di dinas sudah baik, tapi untuk pembantu dinas seperti penyuluh itu masih kurang. Sebenarnya masyarakat atau akademisi juga ikut campur dalam hal ini, intinya yang mengerti perlindungan lahan pertanian masih kurang”

Kemudian menurut Kelompok Tani Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Dalam pemerintahan tentu memiliki SDM yang mumpuni”

Kemudian menurut Kelompok Tani Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Untuk standar SDM di pemerintahan itu sudah ada. Tapi secara kerja ini masih kurang efisien. Dalam arti tindakan dari pihak pemerintah terhadap proses pengayoman kepada masyarakat itu kurang”

Dari hasil wawancara mayoritas informan mengatakan untuk sumber daya manusia yang kompeten dalam proses Implementasi Kebijakan Perlindungan

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian memiliki sumber daya manusia dan kompetensi yang sesuai standar pegawai yang diperlukan.

Berdasarkan hasil observasi mayoritas informan terkait sumber daya manusia yang kompeten dalam proses Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian memiliki sumber daya manusia dan kompetensi yang sesuai standar pegawai yang diperlukan sehingga dapat mengerjakan tugas sesuai bidangnya.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi tersebut dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia yang kompeten dalam proses Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian memiliki sumber daya manusia yang sudah memiliki kompetensi yang baik sesuai dengan standar kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

b. Kewenangan yang bersifat formal dan kuat agar perintah dilaksanakan

Untuk mengetahui bagaimana Kewenangan yang bersifat formal dan kuat agar perintah dilaksanakan. Hasil wawancara ini dikatakan oleh Sekertaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu yaitu :

“Ada kewenangan dan aturan dalam dinas ini yang memungkinkan tenaga kerja disini tentu menjalankan tugasnya masing masing”

Kemudian menurut kepala seksi Rehabilitasi Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman Pangan di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Di dalam semua dinas pasti ada kebijakan untuk pegawai yang tentunya harus dilaksanakan dan kita sesama pegawai tinggal mengingatkan satu sama lain”

Kemudian menurut kepala Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Semua organisai pasti ada aturan yang mengikat pegawai dan ada SOP tentu saja itu harus dilaksanakan. Karena kalo tidak kita dapat sangsi atau hukuman seperti dipindah tugaskan”

Kemudian menurut kepala Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Kewenangan yang ada di dinas semuanya formal dan otomatis perintahnya dilaksanakan”

Kemudian menurut kepala Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Yang memiliki wewenang dalam menegakat peraturan adalah pemangku kebijakan dan dalam hal ini sudah bagus semua tugas yang diberikan kepada petugas sudah pasti dilaksanakan”

Kemudian menurut Kelompok Tani Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Para pemegang kewenangan tentu orang-orang yang hebat dan setiap perintah yang mereka berikan kepada bawahan pasti dilaksanakan”

Kemudian menurut Kelompok Tani Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Kewenangan dari pemerintah kuat, jadi bawahan itu sudah pasti melaksanakan tugas yang kepala berikan. Walaupun dalam kenyataannya tidak tahu karena kepribadian seseorang berbeda-beda”

Kemudian menurut Kelompok Tani Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Kewenangan dari pemerintah itu sudah pasti kuat tapi kenyataannya kadang menyepelkan”

Dari hasil wawancara mayoritas informan mengatakan untuk kewenangan yang bersifat formal dan kuat agar perintah dilaksanakan semua pegawai sudah melaksanakan semua tugas yang diberikan oleh masing-masing bagian dalam dinas karena kewenangan yang kuat sehingga tugas yang diberikan dapat diselesaikan dengan baik.

Berdasarkan hasil observasi mayoritas informan terkait kewenangan yang bersifat formal dan kuat agar perintah dilaksanakan berjalan dan dapat dilaksanakan sesuai dengan kewenangan-kewenangan yang berlaku. Tapi ada permasalahan dimana masih ada pegawai yang kurang memperhatikan perintah sehingga tugas yang dijalankan kurang maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi tersebut dapat disimpulkan bahwa kewenangan yang bersifat formal dan kuat agar perintah dilaksanakan ini

sudah berjalan baik dan memiliki aturan-aturan yang dijalankan setiap pegawai dengan dilakukan pengawasan secara terus menerus.

c. Fasilitas fisik dalam proses implementasi kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Untuk mengetahui bagaimana fasilitas fisik dalam proses implementasi kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Hasil wawancara ini dikatakan oleh Sekertaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu yaitu :

“Untuk fasilitas sendiri gunang menunjang pekerjaan dan lain-lain kita sudah bagus dan akan terus ditingkatan”

Kemudian menurut kepala seksi Rehabilitasi Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman Pangan di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Di dinas sendiri fasilitasnya sudah baik sehingga dapat menyelesaikan tugas pegawai dengan tepat”

Kemudian menurut kepala Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Fasilitas untuk menunjang pekerjaan agar mudah tentu dinas sudah baik”

Kemudian menurut kepala Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Fasilitas di dinas sudah baik untuk menunjang jalannya LP2B dan yang lainnya”

Kemudian menurut kepala Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Fasilitas untuk menunjang dalam proses berjalannya LP2B sudah bagus dan lengkap entah itu dari dinas dan dari kita BPP”

Kemudian menurut Kelompok Tani Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Fasilitas yang ada di pemerintahan sudah bagus, bisa menunjang kinerja pegawai dalam memaksimalkan”

Kemudian menurut Kelompok Tani Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Untuk fasilitas sudah bagus dan tinggal menambahkan yang belum ada”

Kemudian menurut Kelompok Tani Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Fasilitas yang ada kantor-kantor itu sudah bagus sudah menunjang kemudahan. Tapi masih ada juga yang kurang atau rusak. Kalau di pertanian itu ada bangunan pondasi irigasi supaya alirannya lancar. Fasilitas ini kurang menyeluruh”

Dari hasil wawancara mayoritas informan mengatakan untuk fasilitas fisik dalam proses implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sudah ada dan memadai untuk mempermudah implementor dalam melaksanakan tugas.

Berdasarkan hasil observasi mayoritas informan terkait fasilitas fisik dalam proses Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan sudah memadai untuk pegawai dapat menjalankan tugas-tugasnya. Tapi ada fasilitas di kantor yang perlu diperbaiki atau diganti.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi tersebut dapat disimpulkan bahwa fasilitas fisik dalam proses Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam kantor sudah baik dan memadai namun dilapangan yang menunjang ketahanan pangan masih kurang.

Berdasarkan hasil uraian tiap indikator dari variabel sumber daya dapat disajikan bahwa Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu memiliki SDM yang kompeten dalam setiap bidangnya sehingga dapat mematuhi dan menjalankan tugas sesuai jabatannya kemudian hal tersebut di pengaruhi oleh fasilitas yang memadai di dalam Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

3. Disposisi

a. Komitmen yang bertanggung jawab terhadap jalannya proses implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Untuk mengetahui bagaimana komitmen yang bertanggung jawab terhadap jalannya proses implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Hasil wawancara ini dikatakan oleh Sekertaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu yaitu :

“Tentu dalam semua dinas pasti ada aturan yang mengikat setiap pegawainya dan secara tidak langsung ini merupakan komitmen yang berguna agar pegawai menjalankan tugas sesuai dengan jabatannya. Begitu juga mengenai bagian Perlindungan Lahan Pertanian sudah ada yang menanganinya”

Kemudian menurut kepala seksi Rehabilitasi Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman Pangan di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Komitmen itu pasti karena kita terikat oleh aturan. Apalagi terkait kepentingan orang banyak seperti perlindungan lahan pertanian dan ketahanan pangan”

Kemudian menurut kepala Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Semua aturan di dinas itu sifatnya mengikat otomatis pasti secara tidak langsung berkomitmen terhadap tugas-tugas yang mereka emban seperti perlindungan lahan pertanian prduktif”

Kemudian menurut kepala Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Dalam komitmen ini landasannya adalah peraturan yang sifatnya mengikat dan akan dilaksanakan semua pegawa kedinasan”

Kemudian menurut kepala Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Dalam menegakan suatu kebijakan tentu harus ada kesepakatan antara beberapa pihak dimana ini akan berdampak dalam pelaksanaan tugas pegawai”

Kemudian menurut Kelompok Tani Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Memang harus ada komitmen dari dinas sendiri, karena jika instansi terkait tidak saling memiliki komitmen maka yang terjadi penerapan kebijakan tersebut tidak berjalan”

Kemudian menurut Kelompok Tani Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Di instansi pemerintahan pasti ada orang-orang yang berpengaruh dan orang tersebut pasti bisa mempengaruhi orang lain agar siap berkomitmen dalam menjalankan tugas”

Kemudian menurut Kelompok Tani Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Seperti yang sudah dijelaskan tadi kewenangan pemerintah itu sudah pasti kuat ditambah dengan aturan tertulis. Tapi kembali pada kenyataannya dimana masih ada pihak yang lalai terhadap komitmen”

Dari hasil wawancara mayoritas informan mengatakan untuk komitmen yang bertanggung jawab terhadap jalannya proses implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian ini memiliki orang-orang yang kompeten sehingga dalam melaksanakan tugas sesuai dengan komitmen yang dibangun.

Berdasarkan hasil observasi mayoritas informan terkait komitmen yang bertanggung jawab terhadap jalannya proses implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sudah baik sehingga memiliki sikap profesional dalam melaksanakan tugas. Tapi tidak semua personal memiliki sikap demikian, karena sikap manusia yang mudah berubah mengakibatkan rencana yang sudah dijalankan menjadi berubah ditengah perjalanan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi tersebut dapat disimpulkan bahwa komitmen yang bertanggung jawab terhadap jalannya proses implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sudah ada kesepakatan sehingga tepat sasaran dalam menjalankan tugas. Tapi dengan karakter orang yang berbeda-beda sehingga setiap orang memiliki tanggapan dan cara untuk memahami perintah berbeda-beda.

b. Pembagian kerja sesuai dengan kemampuan petugas dalam Implementasi kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Untuk mengetahui bagaimana pembagian kerja sesuai dengan kemampuan petugas dalam Implementasi kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Hasil wawancara ini dikatakan oleh Sekertaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu yaitu :

“Sama kaitannya seperti tadi bahwa sumber daya manusianya tentu kemampuan sudah sesuai dengan bidangnya dan kita terus melakukan pengawasan agar pegawai menjalankan tugas yang sesuai”

Kemudian menurut kepala seksi Rehabilitasi Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman Pangan di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Hal ini ada kaitannya dengan BKPSDM yaitu mengenai pengadaan pegawai yang diperlukan oleh dinas atau kita mengusulkan. Tentunya kita ada kriteria tertentu agar nanti ketika ditempatkan dapat berjalan sesuai tugasnya”

Kemudian menurut kepala Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Pembagian kerja ini tentu penting agar penerima tugas dapat menjalankan tugasnya. Di setiap dinas pasti mereka memikirkan dengan matang ketika ingin memberikan tugas kepada pegawai untuk menjalankan tugas tersebut. Seperti pengalaman dan latar belakangnya”

Kemudian menurut kepala Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Dalam pembagian tugas tentu sudah baik oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk menunjang terciptanya ketahanan pangan”

Kemudian menurut kepala Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Kalau dalam pembagain kerja sudah baik dan kita memiliki orang-orang yang kompeten”

Kemudian menurut Kelompok Tani Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Kalau dari proses seleksi pegawai negeri itu baik maka orang-orang yang lolos adalah orang yang berkualitas dan berpotensi. Jadi tanpa mereka beri pengarahan yang banyak mereka sudah memahami”

Kemudian menurut Kelompok Tani Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Hal ini sudah ada standar, sudah ada yang mengatur. Sesuai apa yang diinginkan dinas”

Kemudian menurut Kelompok Tani Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Kalau lembaga pemerintahan dalam masalah tersebut pasti teliti dan menggunakan standar yang ada dan sudah berjalan dengan baik tapi kurang maksimal”

Dari hasil wawancara mayoritas informan mengatakan untuk pembagian kerja sesuai dengan kemampuan petugas dalam Implementasi kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ini sudah tepat sasaran dalam pembagian kerja sesuai dengan kompetensi yang dimiliki masing-masing pegawai.

Berdasarkan hasil observasi mayoritas informan terkait pembagian kerja sesuai dengan kemampuan petugas dalam Implementasi kebijakan Perlindungan

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sudah baik sehingga memiliki sikap profesional dalam melaksanakan tugas sesuai dengan kemampuan personal dan sesuai dengan kriteria yang diinginkan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi tersebut dapat disimpulkan bahwa pembagian kerja sesuai dengan kemampuan petugas dalam Implementasi kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sudah sesuai standar yang ditetapkan oleh Dinas. Dimana dalam pembagian tugas sudah sesuai dengan kemampuan setiap pegawai.

c. Transparansi antara Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dengan Pemerintah, pihak swasta maupun Masyarakat

Untuk mengetahui bagaimana transparansi antara Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dengan Pemerintah, pihak swasta maupun masyarakat. Hasil wawancara ini dikatakan oleh Sekertaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu yaitu :

“Tentu saja, bukan hanya di dinas tapi organisasi lain juga pasti harus ada pelaporan entah itu kepada atasan sesama pegawai dan masyarakat. Apalagi ini dinas yang bekerja untuk pemerintah perlu adanya sistem pencatatan dan pelaporan untuk pemerintah pusat, kepada pihak swasta juga agar dapat bersinergi bersama, dan tentu kepada masyarakat. Hal ini agar semua mengetahui apa yang akan dan sudah di laksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian”

Kemudian menurut kepala seksi Rehabilitasi Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman Pangan di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Kita transparan dalam segi pelaporan kegiatan dana dan yang lainnya”

Kemudian menurut kepala Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Transparansi sudah ada dan baik kepada kita kemudian kita nanti akan menyampaikan kepada kelompok tani dan masyarakat dan dari dinas sendiri terbuka untuk siapa saja yang ingin mendapatkan informasi apapun dengan prosedur tertentu”

Kemudian menurut kepala Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Dinas sendiri terkait transparansi sudah transparan, keterbukaan informasi kesemua pihak seperti pihak swasta, kepada kita BPP kemudian kepada masyarakat”

Kemudian menurut kepala Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Dinas sudah baik dalam transparansi. Kita tidak merasa ada informasi yang kurang semuanya tersampaikan begitu juga kepada organisasi lain yang membantu jalannya ketahanan pangan”

Kemudian menurut Kelompok Tani Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Selama ini belum ada transparansi kepada masyarakat. Tapi untuk ke pemerintah pasti ada karena pelaporan”

Kemudian menurut Kelompok Tani Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Ada transparansi dari DKPP kepada kita berupa anggaran dan kegiatan yang akan dan sudah dilaksanakan oleh dinas. Tetapi untuk ke pihak swasta kurang tahu”

Kemudian menurut Kelompok Tani Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Kalau transparan sudah tapi masih banyak masyarakat dan pihak lain juga yang belum tahu”

Dari hasil wawancara mayoritas informan mengatakan untuk transparansi antara Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dengan Pemerintah, pihak swasta maupun masyarakat ini sudah baik dengan demikian semua pihak baik pemerintah, swasta dan masyarakat dapat mengakses informasi yang diperlukan.

Berdasarkan hasil observasi mayoritas informan terkait transparansi antara Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dengan Pemerintah, pihak swasta maupun masyarakat sudah berjalan baik dan selalu memberikan informasi berupa laporan kegiatan, yang berkaitan dengan anggaran dan pengadaan fasilitas. Tapi informasi tersebut belum bisa diakses oleh semua masyarakat karena fasilitas yang menunjang agar transparansi tersebut dapat dilihat semua orang.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi tersebut dapat disimpulkan bahwa transparansi antara Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dengan

Pemerintah, pihak swasta maupun masyarakat belum berjalan secara optimal. Mayoritas masyarakat tidak mengetahui mengenai informasi dan transparansi dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Berdasarkan hasil uraian tiap indikator dari variabel disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan dapat disajikan bahwa Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu sudah berjalan baik dan sesuai dengan standar operasional yang berlaku baik dari pemerintah maupun tambahan dari dinas terkait sehingga sikap tersebut berdampak bagi kelancaran berjalannya tugas sesuai dengan aturan. Namun dalam praktiknya masih terdapat sikap dari pelaksana kebijakan yang melalaikan komitmen yang sudah disepakati sebelumnya sehingga sikap tersebut membuat masyarakat kekurangan informasi.

4. Struktur Birokrasi

a. Struktur organisasi yang menguasai tupoksinya

Untuk mengetahui bagaimana struktur organisasi yang menguasai tupoksinya. Hasil wawancara ini dikatakan oleh Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu yaitu :

“Seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa Di DKPP ini gabungan dari tiga dinas, sumber daya manusianya tentu kemampuan sudah sesuai dengan bidangnya. Kita juga sangat selektif dalam memilih pegawai yang tepat agar tupoksinya berjalan dengan baik”

Kemudian menurut kepala seksi Rehabilitasi Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman Pangan di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Orang yang bekerja di pemerintahan tentu adalah orang-orang yang terpilih dan lolos dari tes, otomatis mereka menentukan mau kemana dan jadi apa mereka nanti. Dari hal tersebut sudah pasti ketika bekerja mereka pasti mengetahui apa-apa yang menjadi tanggung jawab dia”

Kemudian menurut kepala Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Dari dinas yang itu sudah kompeten dan menguasai tupoksinya”

Kemudian menurut kepala Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Struktur organisasi yang ada di DKPP di tempati oleh orang-orang yang kompeten dalam bidangnya dan sudah pasti berpengalaman menjalankan tugasnya”

Kemudian menurut kepala Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Tadi sudah kita bahas untuk orang-orang yang ada di DKPP ini orang-orang yang kompeten dalam bidangnya karena yang masuk itu melalui seleksi CPNS tentunya dan sesuai bidang yang diinginkan”

Kemudian menurut Kelompok Tani Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Yang bekerja di instansi pemerintahan pasti orang-orang yang terpilih di dalam bidangnya jadi secara umum pasti mumpuni”

Kemudian menurut Kelompok Tani Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Orang yang bekerja di dinas pasti orang-orang hebat dan minimal mereka paham tugas mereka masing-masing”

Kemudian menurut Kelompok Tani Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Dari dinas sudah sesuai standar dalam pembagian tugas kepada pegawai sudah berpedoman pada SOP”

Dari hasil wawancara mayoritas informan mengatakan untuk struktur organisasi yang menguasai tupoksinya sudah sesuai dengan yang berlaku dalam prosedur operasi standar yang ditetapkan oleh pemerintah bertujuan untuk dijadikan tolak ukur memilih pegawai yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan.

Berdasarkan hasil observasi mayoritas informan terkait struktur organisasi yang menguasai tupoksinya penerapannya sudah berjalan baik dan sesuai dengan perencanaan dalam pengadaan pegawai sehingga rencana yang sudah ditetapkan dapat berjalan sebagai mana mestinya karena pelaksananya yang kompeten. Namun dalam praktiknya beberapa pelaksana tidak berjalan seperti demikian karena kurangnya kordinasi antar pegawai.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi tersebut dapat disimpulkan bahwa struktur organisasi yang menguasai tupoksinya sudah diterapkan di Dinas

Ketahanan Pangan dan Pertanian. Hal tersebut sudah ditetapkan oleh BKSDM sehingga penetapan pegawai di Dinas Sudah sesuai dengan kemampuannya.

b. Rasa saling memotivasi dan membangun oleh pelaksana kebijakan

Untuk mengetahui bagaimana rasa saling memotivasi dan membangun oleh pelaksana kebijakan. Hasil wawancara ini dikatakan oleh Sekertaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu yaitu :

“Point pentingnya adalah komunikasi. Dari komunikasi ini tentunya kita dapat mengetahui permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi oleh masing-masing seksi dan dinas kemudian kita saling membantu agar permasalahan yang ada di lapangan dapat diselesaikan dengan baik”

Kemudian menurut kepala seksi Rehabilitasi Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman Pangan di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Tentu sikap saling mengingatkan dalam pekerjaan, rasa saling memotivasi ini sangat penting. Karena dengan kita saling berkomunikasi, jalinan komunikasi antar pegawai itu baik maka pekerjaan atau tugas kita menjadi ringan”

Kemudian menurut kepala Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Tentu dengan komunikasi kita pasti ada rasa saling memotivasi”

Kemudian menurut kepala Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Pasti dalam standar kerja pegawai ada keharusan untuk saling mengingatkan atau memotivasi”

Kemudian menurut kepala Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Itu pasti dalam setiap organisasi tentu kita harus ada komunikasi. Dengan komunikasi ini kita bisa mengetahui permasalahan-permasalahan yang terjadi disetiap bidang. Ketika ada kesulitan kita saling mengingatkan”

Kemudian menurut Kelompok Tani Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Kalau hal itu tidak tahu. Tapi kemungkinan instansi pemerintahan mempunyai kebijakan untuk saling berkomunikasi. Komunikasi ini agar mengetahui masalah sehingga bisa saling bertukar pendapat”

Kemudian menurut Kelompok Tani Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Sudah dijelaskan bahwa instansi pemerintahan memiliki banyak pegawai tentunya harus terjalin komunikasi antar sesama pegawai dengan demikian dapan saling memberi masukan”

Kemudian menurut Kelompok Tani Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Perlu saling memotivasi antar pegawai dan kerjasama antara instansi yang satu dengan yang lain nanti akibatnya kurang sejalan dalam menjalankan tugas”

Dari hasil wawancara mayoritas informan mengatakan untuk rasa saling memotivasi dan membangun oleh pelaksana kebijakan sudah berjalan baik karena adanya komunikasi yang konsisten sehingga antar pegawai dapat mengerti keadaan pegawai lainnya.

Berdasarkan hasil observasi mayoritas informan terkait rasa saling memotivasi dan membangun oleh pelaksana kebijakan penerapannya sudah berjalan baik karena adanya komunikasi yang baik di dalam Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sehingga sesama pegawai bisa saling bertukar pikiran dan saling membantu satu sama lain.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi tersebut dapat disimpulkan bahwa rasa saling memotivasi dan membangun oleh pelaksana kebijakan sudah berjalan baik dengan memiliki sikap saling mengingatkan dan memberikan saran disetiap permasalahan yang dihadapi masing-masing pegawai.

Berdasarkan hasil uraian tiap indikator dari variabel struktur birokrasi dapat disajikan bahwa Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu sudah berjalan baik dan sesuai dengan *Standar Operating Procedures* (SOP). Dengan adanya SOP, dan terdapat komunikasi yang baik antar pegawai berdampak pada ketepatan dalam menjalankan tugas masing-masing.

Berdasarkan uraian setiap indikator komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu berjalan optimal namun ada

hambatan dalam indikator komunikasi dan disposisi. Dalam indikator komunikasi masih terdapat kesenjangan karena proses komunikasi hanya berputar pada implementor kemudian dari implementor belum mengkomunikasikan secara maksimal kepada masyarakat sehingga mayoritas masyarakat belum mengetahui terkait Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Kemudian dalam indikator disposisi terdapat masalah yaitu perubahan sikap atau perubahan kesepakatan secara sepihak, artinya rencana yang sudah disepakati bersama bisa berubah karena kurangnya pengawasan.

4.1.5.2 Hambatan-hambatan Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu

Pada bagian ini peneliti akan menjelaskan hasil wawancara dengan informan mengenai hambatan-hambatan Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu.

1. Komunikasi

a. Hambatan-hambatan dalam melakukan komunikasi yang baik dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kepada masyarakat tentang proses Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam melakukan komunikasi yang baik dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kepada masyarakat tentang

proses Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Hasil wawancara ini dikatakan oleh Sekertaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu yaitu :

Hambatannya terkait kepentingan masyarakat, hal yang kita sampaikan kepada masyarakat yang menurut kita baik tapi ada beberapa pihak mengatakan bahwa itu kurang baik”

Kemudian menurut kepala seksi Rehabilitasi Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman Pangan di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

Hambatannya yaitu terkait pemahaman masyarakat terkait LP2B. Karena masyarakat biasanya cenderung menanyakan timbal balik jika lahan pertaniannya di pertahankan”

Kemudian menurut kepala Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Hambatannya kadang dari dinas terlalu rumit dalam memberikan informasi kemudia hambatan terletak di masyarakat, karena sulit berkomunikasi atau meyakinkan masyarakat agar mempertahankan lahan pertanian apalagi yang produktif agar tidak di alih fungsikan. Karena dalam kebanyakan khusus mereka menjual lahan pertanian karena di iming-imingi harga dua sampai tiga kali lipat. Kemudian dalam peraturan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan perlu adanya kerjasama antara beberpa pihak, seperti dari Pertanian, pihak pemerintah desa, terus PUPR juga yang kaitannya dengan tata ruang”

Kemudian menurut kepala Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Hambatannya yaitu perbedaan pendapat dari dinas kepada masyarakat. Dalam artian yang menurut dinas itu baik belum tentu menurut masyarakat baik. Karena karakter petani itu keras sulit untuk diberikan masukan-masukan yang tidak sesuai dengan apa yang pernah mereka alami”

Kemudian menurut kepala Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Untuk komunikasi dari dinas terkait perlindungan lahan pertanian sendiri tidak ada kendala. Masalah sebenarnya ada di masyarakat, kita sulit mengarahkan kepada masyarakat karena masalah lahan pertanian itu hak mereka”

Kemudian menurut Kelompok Tani Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Belum ada ketegasan dalam mengkomunikasikan dari pihak yang bertanggung jawab dalam peraturan tersebut”

Kemudian menurut Kelompok Tani Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Kurang memberikan informasi terkait LP2B dalam poin titik lahan pertanian yang harus dilindungi”

Kemudian menurut Kelompok Tani Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Hambatannya kurangnya kesadaran dan kemauan pemerintah terhadap proses penyampaian kebijakan. Sehingga pada lapisan masyarakat tidak mengetahui informasi yang ada”

Dari hasil wawancara mayoritas informan mengatakan untuk hambatan-hambatan dalam melakukan komunikasi yang baik dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kepada masyarakat tentang proses Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terdapat pada implementor yang kurang dalam melakukan komunikasi secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil observasi mayoritas informan terkait hambatan-hambatan dalam melakukan komunikasi yang baik dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kepada masyarakat tentang proses Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yaitu kurangnya kemauan implementor dalam berkomunikasi secara menyeluruh sehingga mengakibatkan miskomunikasi atau perbedaan sudut pandang antara implementor dan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi tersebut dapat disimpulkan bahwa hambatan-hambatan dalam melakukan komunikasi yang baik dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kepada masyarakat tentang proses Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yaitu tidak sampainya komunikasi dari implementor kepada masyarakat yang mengakibatkan miskomunikasi.

b. Hambatan-hambatan sosialisasi oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kepada masyarakat tentang proses Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Untuk mengetahui hambatan-hambatan sosialisasi oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kepada masyarakat tentang proses Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Hasil wawancara ini dikatakan oleh Sekertaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu yaitu :

“Masih terkait dengan kepentingan karena masyarakat sulit memahami apa yang kita sampaikan. Menurut kita bagus tapi menurut beberapa pihak kurang bagus”

Kemudian menurut kepala seksi Rehabilitasi Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman Pangan di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Hambatan pertama yaitu kita kesulitan untuk menjangkau seluruh masyarakat yang memiliki lahan pertanian apalagi yang produktif karena lahan pertanian di Indramayu sendiri sangat luas walaupun dibantu oleh penyuluh pertanian. Hambatan kedua terkait anggaran, kita tidak memiliki anggaran khusus untuk mensosialisasikan LP2B”

Kemudian menurut kepala Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Hambatannya kadang terjadi perbedaan pendapat antara dinas dan masyarakat. Dinas tidak bisa memukul rata mengenai pola pikir

masyarakat di daerah Indramayu. Kemudian kenyataan di lapangan itu sangat sulit di bandingkan dengan apa yang ada di bagaian administrasi atau perencanaan ketika rapat. Karena untuk meyakinkan masyarakat bahwa harus melindungi lahan pertanian itu sulit karena mereka di berikan harga yang tinggi sampai tiga kali lipat agar mereka dapat menjual lahan pertanian mereka”

Kemudian menurut kepala Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Sosialisasi dari dinas sudah bagus, ada komunikasi kepada BPP dan masyarakat agar masyarakat dapat melindungi lahan pertaniannya”

Kemudian menurut kepala Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Seperti yang sudah dijelaskan, permasalahannya ada dipemahaman masyarakat mengenai LP2B”

Kemudian menurut Kelompok Tani Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Tapi dalam kenyataan di lapangan belum ada sosialisasi dalam aturan tersebut yang ada hanyalah pemberitahuan. Artinya ketegasan dari instansi terkait agar masyarakat benar-benar melindungi lahan pertanian”

Kemudian menurut Kelompok Tani Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Hambatannya dari dinas kurang memahami kebiasaan dan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang memiliki lahan pertanian”

Kemudian menurut Kelompok Tani Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Hambatannya kurangnya kesadaran pemerintah tentang pentingnya menjaga lahan pertanian”

Dari hasil wawancara mayoritas informan mengatakan untuk hambatan-hambatan sosialisasi oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kepada masyarakat tentang proses Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kurang konsisiten dalam bersosialisasi sehingga tedapat perbedaan sudut pandang antara implementor dan masyarakat kemudian

Berdasarkan hasil observasi mayoritas informan terkait hambatan-hambatan sosialisasi oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kepada masyarakat tentang proses Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yaitu kurangnya kemauan implementor dalam berkomunikasi secara terus menerus dan menyeluruh sehingga kurang mengetahui keluhan di masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi tersebut dapat disimpulkan bahwa hambatan-hambatan sosialisasi oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kepada masyarakat tentang proses Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yaitu kurangnya interaksi

antara implementor dengan masyarakat yang mengakibatkan perbedaan sudut pandang.

c. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan komunikasi yang konsisten oleh Dinas Ketahanan Pangan dan pertanian kepada masyarakat. Tentang proses Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan komunikasi yang konsisten oleh Dinas Ketahanan Pangan dan pertanian kepada masyarakat. tentang proses Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Hasil wawancara ini dikatakan oleh Sekertaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu yaitu :

“Dalam hambatan masih sama yaitu walaupun kita mengkomunikasikan secara terus menerus masih ada perbedaan sudut pandang seperti yang menurut kita baik tapi menurut beberapa pihak kurang”

Kemudian menurut kepala seksi Rehabilitasi Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman Pangan di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Dalam melakukan komunikasi dan sosialisasi tentunya harus konsisten agar tadi, masyarakat dapat memahami apa itu LP2B secara perlahan. Tapi dalam hal ini kita perlu tenaga yang ekstra dan tentunya belum ada anggaran khusus untuk diadakannya sosialisasi terkait LP2B”

Kemudian menurut kepala Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Kita tidak bisa memberikan kewenangan dalam mengadili. Tugas kita hanya menyampaikan terkait perlindungan lahan pertanian”

Kemudian menurut kepala Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“LP2B ini belum terlalu digaris bawahi oleh dinas sehingga dalam penyampaiannya belum merata”

Kemudian menurut kepala Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Dinas sendiri sudah konsisten dan tentu tidak ada masalah dalam hal itu. Tinggal dari masyarakatnya yang harus kita bina”

Kemudian menurut Kelompok Tani Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Karena mereka lebih memfokuskan menangani penyakit tanaman padi atau hama dan semacamnya kemudian pupuk atau obat untuk tanaman pangan. Jadi alih fungsi lahan tidak terlalu ditekankan dan akhirnya tidak konsisten dalam menangani alih fungsi lahan”

Kemudian menurut Kelompok Tani Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Hambatannya kurangnya kesadaran pemerintah tentang pentingnya menjaga lahan pertanian”

Kemudian menurut Kelompok Tani Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Hambatannya kurangnya kesadaran pemerintah tentang pentingnya menjaga lahan pertanian”

Dari hasil wawancara sebagian informan mengatakan untuk hambatan-hambatan dalam pelaksanaan komunikasi yang konsisten oleh Dinas Ketahanan Pangan dan pertanian yaitu terkait perbedaan pendapat antara implementor dan masyarakat kemudian sebagian informan mengatakan kurangnya kesadaran implementor yang berkaitan alih fungsi lahan.

Berdasarkan hasil observasi mayoritas informan terkait hambatan-hambatan dalam pelaksanaan komunikasi yang konsisten oleh Dinas Ketahanan Pangan dan pertanian kepada masyarakat. tentang proses Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yaitu kurangnya kesadaran dari pemangku kebijakan terkait Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kemudian perbedaan sudut pandang karena kurangnya interaksi antara pemerintah dan masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi tersebut dapat disimpulkan bahwa hambatan-hambatan dalam pelaksanaan komunikasi yang konsisten oleh Dinas Ketahanan Pangan dan pertanian kepada masyarakat. tentang proses Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yaitu terdapat miskomunikasi antara Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Balai Penyuluh Pertanian dengan masyarakat.

Berdasarkan hasil uraian tiap indikator dari variabel komunikasi dapat disajikan bahwa hambata-hambatan Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu disebabkan oleh kurangnya komunikasi dua arah yang konsisten antara semua pihak baik itu implementor dan masyarakat yang berakibat pada kurangnya informasi yang diterima masyarakat mengenai Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan informasi lainnya dan mengakibatkan perbedaan sudut pandang.

2. Sumber Daya

a. Hambatan-hambatan sumber daya manusia yang kompeten dalam proses Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Untuk mengetahui hambatan-hambatan sumber daya manusia yang kompeten dalam proses Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Hasil wawancara ini dikatakan oleh Sekertaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu yaitu :

“Hambatannya mungkin banyak generasi muda yang kurang minat dalam bidang pertanian, peternakan, dan sejenisnya”

Kemudian menurut kepala seksi Rehabilitasi Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman Pangan di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Dari kita kan mengajukan ke BKSDM kemudian dari situ ke BKN, mungkin disitulah hambatannya. Butuh proses dalam pengadaan pegawai”

Kemudian menurut kepala Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Sebenarnya latar belakang pendidikan itu tidak menjamin ketika praktik di lapangan tapi tergantung orangnya di ini tidak memukul rata. Tapi memang dalam kenyataan di lapangannya seperti itu, bahkan ada orang-orang yang latar pendidikannya bukan di bidang pertanian tapi dia sangat memahami luar dalam dalam bidang pertanian”

Kemudian menurut kepala Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Hambatannya yaitu tentu keadaan di lapangan dengan di kantor berbeda. Artinya perencanaan di dalam dinas masih kurang matang”

Kemudian menurut kepala Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Dalam kenyataan di lapangan ada yang sesuai dan ada yang tidak karena setiap orang beda-beda”

Kemudian menurut Kelompok Tani Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Karena orang-orang yang kompeten dalam bidang itu lebih memilih pekerjaan lain tidak bergelut di bidang pertanian”

Kemudian menurut Kelompok Tani Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“kurangnya sarjana yang mau berkontribusi dalam pertanian”

Kemudian menurut Kelompok Tani Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Kurangnya pengawasan dan kerjasama antar pemerintah terhadap proses itu”

Dari hasil wawancara mayoritas informan mengatakan untuk hambatan-hambatan sumber daya manusia yang kompeten dalam proses Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian berkaitan tentang komitmen ketika menjalankan tugas di lapangan. Karena keadaan dilapangan dengan saat perencanaan itu biasanya berbeda yang membuat pegawai mengambil tindakan yang tidak sesuai dengan yang sudah ditetapkan

Berdasarkan hasil observasi mayoritas informan terkait hambatan-hambatan sumber daya manusia yang kompeten dalam proses Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yaitu kurangnya kepatuhan dari pihak pelaksana sehingga seringkali salah menggunakan wewenang sehingga perencanaan yang sudah disepakati menjadi tidak efektif.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi tersebut dapat disimpulkan bahwa hambatan-hambatan dalam sumber daya manusia yang kompeten dalam proses Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan Oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yaitu terdapat perbedaan antara rencana dan keadaan di lapangan sehingga berdampak pada kesalah dalam menggunakan wewenang sehingga perencanaan seringkali tidak berjalan sesuai rencana.

b. Hambatan-hambatan kewenangan yang bersifat formal dan kuat agar perintah dilaksanakan

Untuk mengetahui hambatan-hambatan kewenangan yang bersifat formal dan kuat agar perintah dilaksanakan. Hasil wawancara ini dikatakan oleh Sekertaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu yaitu :

“Tentu akan tetap ada hambatan dalam hal ini karena setiap orang berbeda-beda dan ini tidak bisa diubah. Semua tugas atau perintah sudah pasti dilaksanakan”

Kemudian menurut kepala seksi Rehabilitasi Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman Pangan di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Hambatannya yaitu masalah pemahaman saja”

Kemudian menurut kepala Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Hambatannya mungkin membuat kewenangan yang kedengarannya sulit tapi mudah untuk dilaksanakan, intinya fleksibel. Ini tentu pemikiran yang matang. Kemudian kita tidak bisa selalu melakukan pengawasan terhadap jalannya kewenangan terhadap seseorang”

Kemudian menurut kepala Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Hambatannya ada beberapa kewenangan yang kurang dan kekurangan ini yang dapat dimanfaatkan untuk tidak dilaksanakan karena mungkin kurang diawasi”

Kemudian menurut kepala Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Sejauh ini tidak ada hambatan karena tadi pemangku kebijakannya sudah baik jadi yang menerima tugas sudah pasti akan melaksanakan sebaik mungkin”

Kemudian menurut Kelompok Tani Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Mungkin masih ada perintah yang tertinggal karena kurang pengawasan”

Kemudian menurut Kelompok Tani Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Hambatannya tentu tadi kesulitan dalam menyatukan orang-orang yang berbeda-beda agar berada dalam satu perintah”

Kemudian menurut Kelompok Tani Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Hambatannya kurang pengawasan”

Dari hasil wawancara mayoritas informan mengatakan untuk hambatan-hambatan kewenangan yang bersifat formal dan kuat agar perintah dilaksanakan

berkaitan tentang pengawasan dari pihak instansi kepada pegawai yang berakibat pada kewenangan yang tidak tepat sasaran.

Berdasarkan hasil observasi mayoritas informan terkait hambatan-hambatan kewenangan yang bersifat formal dan kuat agar perintah dilaksanakan yaitu kurangnya pengawasan dari atasan atau sesama pegawai sehingga kewenangan yang diberikan menjadi tidak efektif. Kemudian masalah pemahaman implementor dalam memahami tugas, sehingga sering terjadi kesalahan dalam melaksanakannya.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi tersebut dapat disimpulkan bahwa hambatan-hambatan kewenangan yang bersifat formal dan kuat agar perintah dilaksanakan yaitu kurangnya pengawasan terhadap semua aspek pegawai dan kurangnya rasa tanggung jawab pegawai sehingga dalam pelaksanaan tugas tidak tepat sasaran.

c. Hambatan-hambatan dalam pengadaan fasilitas fisik dalam proses Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pengadaan fasilitas fisik dalam proses Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Hasil wawancara ini dikatakan oleh Sekertaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu yaitu :

”Untuk hambatan dalam fasilitas fisik ini pengadaan atau melengkapi apa-apa saja yang kurang itu butuh proses”

Kemudian menurut kepala seksi Rehabilitasi Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman Pangan di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Belum ada fasilitas khusus untuk masalah LP2B”

Kemudian menurut kepala Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Dalam pengadaan fasilitas perlu ada proses dan hal ini harus sabar untuk menunggu pengajuan atas fasilitas baru. Kemudian ada beberapa fasilitas yang tidak layak seperti bangunan, lemari, dan tataletak gedung harus diperbaiki”

Kemudian menurut kepala Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Untuk hambatan dalam fasilitas tidak ada”

Kemudian menurut kepala Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Ada beberapa fasilitas yang kurang dan waktunya diganti”

Kemudian menurut Kelompok Tani Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Hambatannya fasilitas diluar dinas yang kurang. Dalam artian untuk menjaga lahan pertanian perlu ada fasilitas di masyarakat supaya masyarakat lebih bersemangat dalam menjaga lahan pertanian”

Kemudian menurut Kelompok Tani Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Sejauh ini tidak ada hambatan”

Kemudian menurut Kelompok Tani Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Hambatannya adalah biaya yang terbatas dan untuk kepentingan lain. Tapi sebisa mungkin harus merata”

Dari hasil wawancara mayoritas informan mengatakan untuk hambatan-hambatan dalam pengadaan fasilitas fisik dalam proses Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yaitu ada beberapa fasilitas yang kurang dan fasilitas yang rusak belum diperbaiki. Hal ini karena minimnya anggaran dan butuh proses dalam pengadaan fasilitas tersebut.

Berdasarkan hasil observasi mayoritas informan terkait hambatan-hambatan dalam pengadaan fasilitas fisik dalam proses Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terdapat fasilitas yang harus diperbaiki agar proses pelayanan dapat efektif. Kemudian fasilitas yang ada di masyarakat yang kurang seperti pondasi irigasi, sarana informasi bagi petani seperti saung pertanian. Hal tersebut berakibat pada masyarakat yang kurang dalam mengakses informasi.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi tersebut dapat disimpulkan bahwa hambatan-hambatan dalam pengadaan fasilitas fisik dalam proses Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan perlu adanya fasilitas di Dinas yang diperbaiki dan dilakukan perawatan secara berkala dan menambahkan sarana informasi diluar Dinas guna menunjang akses dalam proses komunikasi.

Berdasarkan hasil uraian tiap indikator dari variabel sumber daya dapat disajikan bahwa hambata-hambatan Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu disebabkan oleh kurangnya kedisiplinan dan rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugas, ditandai dengan kurangnya komunikasi kepada masyarakat. Kemudian fasilitas fisik di Dinas yang perlu adanya perbaikan, perawatan dan pengadaan jika ada fasilitas yang kurang di dalam maupun di luar Dinas.

3. Disposisi

a. Hambatan-hambatan dalam membangun komitmen yang bertanggung jawab terhadap jalannya proses Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam membangun komitmen yang bertanggung jawab terhadap jalannya proses Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Hasil wawancara ini dikatakan oleh Sekertaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu yaitu :

“Dalam hal ini terkait dengan pemahaman dan kemampuan setiap orang karena berbeda-beda setiap orangnya. Karena ini dinas yang pasti pelayanan terhadap masyarakat, minimal pegawainya sudah memiliki pemahaman yang baik”

Kemudian menurut kepala seksi Rehabilitasi Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman Pangan di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Sering lupa dengan apa yang sudah di rencanakan. Karena memang pekerjaan di DKPP ini kan luas apalagi ini dinas baru”

Kemudian menurut kepala Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Hambatannya bukan di komitmen tapi kenyataan di lapangan. Karena ada pegawai yang sangat kompeten tapi ketika terjun ke masyarakat kesulitan karena masyarakatnya sulit menerima masukan dan mementingkan apa untungnya untuk mereka”

Kemudian menurut kepala Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Hambatannya yaitu belum banyak pihak-pihak yang berkomitmen dalam adanya perlindungan lahan pertanian. Semuanya harus terlibat dalam proses menjaga ketahanan pangan”

Kemudian menurut kepala Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Hambatannya terletak pada kemampuan untuk menjaga komitmen tersebut tentu ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab atas komitmennya”

Kemudian menurut Kelompok Tani Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Tidak semua orang dapat mempertahankan komitmen ini kadang hanya wacana tidak ada rasa memiliki tanggung jawab bahwa kita harus mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab kita”

Kemudian menurut Kelompok Tani Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Kurangnya orang-orang yang memiliki kekuatan memerintah di dinas. Semakin banyak semakin bagus karena ada yang ditakuti nantinya otomatis komitmen yang disepakati tidak akan diingkari”

Kemudian menurut Kelompok Tani Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Hambatannya kurangnya kesadaran pastinya karena lupa terhadap komitmen”

Dari hasil wawancara mayoritas informan mengatakan untuk hambatan-hambatan dalam membangun komitmen yang bertanggung jawab terhadap jalannya proses Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yaitu kurangnya orang-orang yang dapat mempertahankan komitmen yang sudah disepakati. Karena mereka cenderung berubah ketika melihat kenyataan yang sebenarnya.

Berdasarkan hasil observasi mayoritas informan terkait hambatan-hambatan dalam membangun komitmen yang bertanggung jawab terhadap jalannya proses Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berkaitan dengan kurangnya kekuatan untuk menjaga komitmen

yang dibangun oleh implementor karena kurangnya kesadaran terhadap tanggung jawab. Kemudian kurangnya pengawasan dari pihak atasan dan sesama pegawai.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi tersebut dapat disimpulkan bahwa hambatan-hambatan dalam membangun komitmen yang bertanggung jawab terhadap jalannya proses Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yaitu

b. Hambatan-hambatan dalam pembagian kerja sesuai dengan kemampuan petugas dalam Implementasi kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pembagian kerja sesuai dengan kemampuan petugas dalam Implementasi kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Hasil wawancara ini dikatakan oleh Sekertaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu yaitu :

“Tidak ada hambatan dalam hal ini, sistemnya jika ada yang kurang dalam kepegawaian kita bisa usulkan kepada BKSDM agar bisa mengadakan atau memenuhi kekurangan tersebut”

Kemudian menurut kepala seksi Rehabilitasi Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman Pangan di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Bagaimana caranya kita harus membuat prosedural yang khusus jika itu kaitannya dengan LP2B dalam pengajuan pegawai ke BPKSDM. Lebih

baik sulit di awal agar kita mendapatkan orang-orang yang kompeten dalam bidangnya”

Kemudian menurut kepala Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Karena masih ada pegawai yang belum sesuai dengan tugasnya, ini point dalam penilaian calon pelaksana tugas yang kurang ketat”

Kemudian menurut kepala Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Kalau hal ini sepertinya tidak ada hambatan”

Kemudian menurut kepala Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Tidak ada, dalam pembagian kerja ini sudah bagus”

Kemudian menurut Kelompok Tani Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Sama seperti yang tadi, setiap orang itu berbeda-beda jadi ada banyak kemungkinan. Maksudnya orang akan kelihatan baik agar mendapatkan perhatian supaya bisa mendapatkan tugas yang orang lain ingin mendapatkannya”

Kemudian menurut Kelompok Tani Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Kurangnya orang-orang yang memiliki kekuatan memerintah di dinas. Semakin banyak semakin bagus karena ada yang ditakuti nantinya otomatis komitmen yang disepakati tidak akan diingkari”

Kemudian menurut Kelompok Tani Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Masih ada pembagian kerja yang kurang tepat sasaran”

Dari hasil wawancara mayoritas informan mengatakan untuk hambatan-hambatan dalam pembagian kerja sesuai dengan kemampuan petugas dalam Implementasi kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berkaitan tentang pengawasan yang kurang, kemudian selektif dalam proses penetapan kerja setiap pegawai masih kurang ketat sehingga ada yang tidak sesuai dalam pembagian kerja.

Berdasarkan hasil observasi mayoritas informan terkait hambatan-hambatan dalam pembagian kerja sesuai dengan kemampuan petugas dalam Implementasi kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yaitu kurangnya pedoman yang ketat dalam pembagian kerja ini sehingga dalam praktiknya terdapat ketidak sesuaian antara jabatan dan kemampuan. Hal tersebut kurangnya selektifitas dan pengawasan di dalam dinas.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi tersebut dapat disimpulkan bahwa hambatan-hambatan dalam pembagian kerja sesuai dengan kemampuan petugas dalam Implementasi kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan masih terdapat pegawai yang kurang memahami mengenai tugas pokok dan fungsinya ini disebabkan kurang selektif dalam proses pembagian kerja.

c. Hambatan-hambatan dalam proses transparansi antara Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dengan pemerintah, pihak swasta dan masyarakat

Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam proses transparansi antara Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dengan pemerintah, pihak swasta dan masyarakat. Hasil wawancara ini dikatakan oleh Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu yaitu :

“Dalam hal ini tentu ada beberapa pihak yang tidak mengetahui informasi yang ada di DKPP karena kita tidak memungkinkan menjangkau semuanya. Tetapi kita tentu transparan dan informasi ini dapat di akses oleh masyarakat jika ingin mengetahui. Kalau teknologi ini sudah merata mungkin kita lebih mudah untuk memberikan informasi apapun”

Kemudian menurut kepala seksi Rehabilitasi Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman Pangan di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Yang perlu kita pikirkan sebenarnya akses yang dapat dilihat semua orang. Artinya perlu fasilitas masyarakat untuk bisa mengakses informasi yang ada di dinas”

Kemudian menurut kepala Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Hambatannya tentu akses yang dapat orang lain lihat masih terbatas, artinya untuk melihat informasi perlu adanya kemauan dari masyarakat sendiri”

Kemudian menurut kepala Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Hambatan dalam hal ini adalah masalah informasi. Artinya kemudahan mengakses informasi oleh semua orang”

Kemudian menurut kepala Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Sudah baik, jadi tidak ada hambatan yang berarti”

Kemudian menurut Kelompok Tani Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Kurangnya fasilitas untuk menyampaikan informasi. Dalam artian jika ada fasilitas seperti saung di setiap blok sawah untuk tempat berkumpul sekaligus tempat diskusi jika ada yang perlu disampaikan dari dinas atau penyuluh”

Kemudian menurut Kelompok Tani Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Hambatannya mungkin tidak semua hal kita bisa akses. Kita harus datang ke kantor untuk mengetahuinya”

Kemudian menurut Kelompok Tani Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Hambatannya terletak pada kemauan masyarakat untuk mengetahui informasi dari pemerintah”

Dari hasil wawancara mayoritas informan mengatakan untuk hambatan-hambatan dalam proses transparansi antara Dinas Ketahanan Pangan dan

Pertanian dengan pemerintah, pihak swasta dan masyarakat yaitu kemudahan dalam mengakses informasi belum ada fasilitas yang mumpuni agar masyarakat bisa melihat kegiatan, anggaran, dan rencana kegiatan yang ada di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau Balai Penyuluh Pertanian.

Berdasarkan hasil observasi mayoritas informan terkait hambatan-hambatan dalam proses transparansi antara Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dengan pemerintah, pihak swasta dan masyarakat terkait kurangnya fasilitas pendukung agar masyarakat mengetahui informasi yang disediakan oleh instansi terkait. Karena transparansi hanya diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan seperti pemerintah pusat, swasta, dan BPP.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi tersebut dapat disimpulkan bahwa hambatan-hambatan dalam proses transparansi antara Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dengan pemerintah, pihak swasta dan masyarakat yaitu kurangnya media dan sarana informasi guna tersampainya informasi kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil uraian tiap indikator dari variabel disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan dapat disajikan bahwa hambatan-hambatan Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu disebabkan oleh kurangnya pengawasan terhadap pegawai sehingga berdampak pada kecenderungan lupa dalam tugas pokoknya yang sudah disepakati di awal. Kemudian kurang selektif dalam proses pembagian kerja sehingga dalam penerapannya berjalan namun tidak maksimal dan perlu adanya fasilitas untuk

menunjang proses transparansi kepada masyarakat sehingga masyarakat mengetahui informasi yang diberikan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan Balai Penyuluh Pertanian.

4. Struktur Birokrasi

a. Hambatan-hambatan dalam struktur organisasi yang menguasai tupoksinya

Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam struktur organisasi yang menguasai tupoksinya. Hasil wawancara ini dikatakan oleh Sekertaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu yaitu :

“Dalam yang sudah di jelaskan tadi tentu kemampuan setiap orang berbeda-beda sehingga didalam organisasi pasti ada masalah dalam sistem pegawainya, akan tetapi bukan masalah yang besar, seperti ketelitian dalam bekerja, keterlambatan atau masalah-masalah kecil semacamnya”

Kemudian menurut kepala seksi Rehabilitasi Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman Pangan di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Secara teoritis memang seperti yang tadi dijelaskan, tapi pada kenyataannya tidak semuanya seperti itu. Ada beberapa orang yang memang harus kita berikan arahan ekstra agar benar-benar menguasai tugasnya”

Kemudian menurut kepala Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Hambatannya tentu kita kesulitan mengawasi semua orang agar sejalan dengan tugasnya. Kadang menurut setandar dia sudah masuk kategori mumpuni tapi kita tidak tahu kenyataan ketika di lapangan”

Kemudian menurut kepala Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Tidak ada hambatan dalam hal ini karena dari dinas sudah baik dalam menetapkan pegawai sesuai kemampuannya”

Kemudian menurut kepala Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Tapi kadang ada saja yang tidak sesuai, namanya manusia pasti ada salahnya walau sedikit. Ini dimaklumi”

Kemudian menurut Kelompok Tani Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Kembali pada kenyataan bahwa tidak semuanya berjalan baik begitu juga orang-orang yang bekerja di instansi pemerintahan”

Kemudian menurut Kelompok Tani Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Tidak ada hambatan dalam hal ini”

Kemudian menurut Kelompok Tani Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Dari dinas sudah sesuai standar dalam pembagian tugas kepada pegawai sudah berpedoman pada SOP”

Dari hasil wawancara sebagian informan mengatakan untuk hambatan-hambatan dalam struktur organisasi yang menguasai tupoksinya yaitu kurangnya ketelitian atau selektif dalam proses pembagian kerja sehingga dalam praktiknya ada beberapa pegawai tidak memahami tugas utamanya dan sebagian informan mengatakan tidak ada hambatan dalam hal tersebut.

Berdasarkan hasil observasi mayoritas informan terkait hambatan-hambatan dalam struktur organisasi yang menguasai tupoksinya ini dalam struktur birokrasi sudah sesuai standar yang ada tapi dalam kenyataannya masih terdapat pegawai yang kurang mengerti mengenai tugas pokoknya sehingga dalam penanganan masalah kurang maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi tersebut dapat disimpulkan bahwa hambatan-hambatan dalam struktur birokrasi yang menguasai tupoksinya yaitu kurang selektif dalam pembagian kerja sehingga dalam standarisasi pegawai kurang ketat.

b. Hambatan-hambatan rasa saling memotivasi dan membangun oleh pelaksana kebijakan

Untuk mengetahui hambatan-hambatan rasa saling memotivasi dan membangun oleh pelaksana kebijakan. Hasil wawancara ini dikatakan oleh Sekertaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu yaitu :

“Hambatannya kita harus memahami karakter seseorang karena berbeda-beda dan banyak”

Kemudian menurut kepala seksi Rehabilitasi Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman Pangan di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Perbedaan pemikiran itu pasti dalam setiap organisasi. Ada yang mudah menerima masukan ada juga yang dalam menerima masukan itu harus dicerna dulu”

Kemudian menurut kepala Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Ada orang yang mudah untuk di arahkan dan ada yang harus secara terus menerus”

Kemudian menurut kepala Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Hambatannya tidak ada”

Kemudian menurut kepala Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Dalam hal ini tidak ada hambatan”

Kemudian menurut Kelompok Tani Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Hambatannya pemahaman setiap pegawai yang berbeda-beda sehingga harus memahami satu sama lain”

Kemudian menurut Kelompok Tani Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Biasanya terjadi salah ucapan sehingga ada yang tersinggung”

Kemudian menurut Kelompok Tani Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Tentu tidak ada keinginan untuk saling berkomunikasi sehingga tidak ada kerjasama antar pihak”

Dari hasil wawancara mayoritas informan mengatakan untuk hambatan-hambatan rasa saling memotivasi dan membangun oleh pelaksana kebijakan yaitu berkaitan dengan membaca karakter setiap orang dan membedakan cara berkomunikasinya.

Berdasarkan hasil observasi mayoritas informan terkait hambatan-hambatan rasa saling memotivasi dan membangun oleh pelaksana kebijakan yaitu karakter setiap individu berbeda-beda sehingga harus benar-benar memahami sehingga dalam proses komunikasi bisa berjalan dua arah.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi tersebut dapat disimpulkan bahwa hambatan-hambatan rasa saling memotivasi dan membangun oleh pelaksana kebijakan yaitu terdapat dalam perbedaan karakter setiap individu atau pegawai sehingga dalam pemahaman dan proses pelaksanaan tugas akan berbeda-beda.

Berdasarkan hasil uraian tiap indikator dari variabel struktur birokrasi dapat disajikan bahwa hambatan-hambatan Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Oleh Dinas Ketahanan Pangan dan

Pertanian Kabupaten Indramayu disebabkan oleh kurangnya pengawasan sesama pegawai sehingga terdapat pembagian kerja tidak sesuai dengan kemampuannya sehingga dalam pelaksanaan tugas tidak berjalan maksimal.

Berdasarkan uraian setiap indikator komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi maka dapat disimpulkan bahwa Hambatan-hambatan dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu yaitu terdapat miskomunikasi yang disebabkan oleh sikap dari para pelaksana yang pasif sehingga mempengaruhi dalam tersampainya informasi kepada masyarakat sehingga keluhan dan masukan dari masyarakat tidak sampai ke Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu.

4.1.5.3 Upaya dalam menangani hambatan-hambatan Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu

Pada bagian ini peneliti akan menjelaskan hasil wawancara dengan informan mengenai hambatan-hambatan Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu.

1. Komunikasi

a. Upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan komunikasi yang baik dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kepada masyarakat tentang proses Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Untuk mengetahui upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan komunikasi yang baik dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kepada masyarakat tentang proses Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Hasil wawancara ini dikatakan oleh Sekertaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu yaitu :

“Upayanya yaitu dengan mengkomunikasikan secara terus menerus dengan kepentingan atau manfaat yang lebih besar agar terwujudnya Indramayu sebagai lumbung pangan Nasional”

Kemudian menurut kepala seksi Rehabilitasi Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman Pangan di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

”Tentu dari pemahaman masyarakat, kita perlu memberika pemahaman yang sekiranya dapat dipahami oleh masyarakat betapa pentingnya melindungi lahan pertanian agar tercapainya keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan lahan pertanian untuk ketahanan pangan

Kemudian menurut kepala Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Tentu kita harus saling bekerjasama dengan semua pihak. Karena mempertahankan lahan pertanian merupakan hal yang harus di tegakan karena ini menyangkit kepentingan seluruh umat manusia agar terciptanya keseimbangan dan ketahanan pangan”

Kemudian menurut kepala Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Sesering mungkin untuk melakukan komunikasi dengan masyarakat agar pemerintah mengerti, sehingga cara untuk menyampaikan sesuatu dapat diterima oleh masyarakat”

Kemudian menurut kepala Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Kalau upaya lebih ke memaksimalkan komunikasi, agar masyarakat pelan-pelan memahami”

Kemudian menurut Kelompok Tani Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Harus ada ikut campur mengenai perlindungan lahan pertanian dari semua pihak”

Kemudian menurut Kelompok Tani Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Upayanya dengan memberikan informasi yang jelas tentang lahan pertanian yang produktif agar tidak dialih fungsikan”

Kemudian menurut Kelompok Tani Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Upayanya harus ada kerjasama antar pemangku kebijakan agar bisa terjalinnnya komunikasi supaya masyarakat terbimbing”

Dari hasil wawancara mayoritas informan mengatakan untuk upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan komunikasi yang baik dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kepada masyarakat tentang proses Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yaitu dengan melakukan komunikasi secara terus menerus oleh semua pihak.

Berdasarkan hasil observasi mayoritas informan terkait upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan komunikasi yang baik dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kepada masyarakat tentang proses Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yaitu dengan berkomunikasi secara konsisten sehingga masyarakat perlahan memahami Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan komunikasi kepada masyarakat dilakukan oleh semua pihak.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan komunikasi yang baik dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kepada masyarakat tentang proses Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yaitu dengan melakukan komunikasi secara berkala kepada masyarakat.

b. Upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan sosialisasi oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kepada Masyarakat tentang proses Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Untuk mengetahui upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan sosialisasi oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kepada Masyarakat tentang proses Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Hasil wawancara ini dikatakan oleh Sekertaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu yaitu :

“Perlu adanya sosialisasi secara berkelanjutan, sinkronisasi dan kesepahaman dalam rangka kepentingan yang lebih luas”

Kemudian menurut kepala seksi Rehabilitasi Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman Pangan di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Terkait upaya untuk menangani hambatan tadi yang sudah di jelaskan yaitu untuk pemahaman masyarakat, kita perlu melakukan komunikasi secara terus-menerus agar masyarakat memahami betapa pentingnya lahan pertanian khususnya yang produktif. Kemudian karena tidak ada anggaran khusus, jadi kita sosialisasi ketika kita monitoring langsung kelapangan bertemu dengan penyuluh, kelompok tani atau masyarakat sembari menyampaikan LP2B”

Kemudian menurut kepala Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Upayanya dengan memahami keinginan masyarakat di setiap daerah dan harus ada komunikasi dari semua pihak untuk LP2B secara terus menerus”

Kemudian menurut kepala Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Upayanya yaitu memberikan fasilitas agar masyarakat dapat melihat informasi dan dengan memahami budaya dan kebiasaan di beberapa daerah yang ada di Indramayu dan harus membedakan cara penyampaian kepada masyarakat di setiap daerah yang berbeda”

Kemudian menurut kepala Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Kita terus melakukan sosialisasi dan komunikasi untuk memberikan informasi secara berkala”

Kemudian menurut Kelompok Tani Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Harus ada ketegasan dari instansi yang bertanggung jawab atas aturan tersebut”

Kemudian menurut Kelompok Tani Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Masyarakat butuh perhatian lebih dari dinas atau dari pejabat agar terjalin komunikasi dua arah”

Kemudian menurut Kelompok Tani Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Upayanya harus ada pengingat dari pemerintah atau masyarakat mengenai pentingnya menjaga lahan pertanian pangan”

Dari hasil wawancara mayoritas informan mengatakan untuk upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan sosialisasi oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kepada Masyarakat tentang proses Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yaitu dengan memahami apa yang diinginkan masyarakat dan melakukan komunikasi secara konsisten.

Berdasarkan hasil observasi mayoritas informan terkait upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan sosialisasi oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kepada Masyarakat tentang proses Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yaitu dengan memahami budaya dimasyarakat dan memahami keinginan masyarakat sehingga yang disampaikan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian bisa tepat sasaran dan hal tersebut dilakukan secara berkala.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan sosialisasi oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kepada Masyarakat tentang proses Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yaitu dengan melakukan pendekatan secara langsung kepada masyarakat sehingga dari para pelaksana kebijakan dapat memahami permasalahan yang terjadi di masyarakat.

c. Upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan komunikasi yang konsisten oleh Dinas Ketahanan Pangan dan pertanian kepada masyarakat. tentang proses Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Untuk mengetahui upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan komunikasi yang konsisten oleh dinas ketahanan pangan dan pertanian kepada masyarakat. tentang proses implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Hasil wawancara ini dikatakan oleh Sekertaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu yaitu :

“Upayanya kita terus berusaha berkomunikasi secara berkala agar apa yang kita sampaikan dapat dipahami dan di terima oleh masyarakat”

Kemudian menurut kepala seksi Rehabilitasi Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman Pangan di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“kita perlu mempersiapkan tenaga yang konsisten, karena untuk konsisten kita perlu siap dalam segala hal terutama tenaga dan pikiran. Kemudian kita perlu anggaran yang tetap untuk komunikasi dan sosialisasi terkait LP2B, karena ini sangat penting untuk terwujudnya ketahanan pangan dimasa depan”

Kemudian menurut kepala Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Agar penyampaian tentnagn LP2B berjalan maksimal maka semua pihak atau pemangku kebijakan tersebut ikut dalam mensosialisasikan kepada masyarakat”

Kemudian menurut kepala Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Upayanya tentu mengadakan komunikasi yang terus menerus khusus untuk LP2B”

Kemudian menurut kepala Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Upayanya dengan bekerja sama dengan beberapa stakeholder terkait perlindungan lahan pertanian agar lebih maksimal dan merata”

Kemudian menurut Kelompok Tani Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Upayanya dengan ada sosialisasi khusus mengenai hal tersebut yang dilakukan secara berkala agar masyarakat mengetahui”

Kemudian menurut Kelompok Tani Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Upayanya tentu harus ada pengawasan supaya ada kemauan untuk memberikan informasi”

Kemudian menurut Kelompok Tani Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Upayanya harus ada komunikasi yang baik antar pemegang kekuasaan agar biasa saling mengingatkan”

Dari hasil wawancara mayoritas informan mengatakan untuk upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan komunikasi yang konsisten oleh dinas ketahanan pangan dan pertanian kepada masyarakat. tentang proses implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yaitu dengan melakukan komunikasi secara terus menerus oleh semua instansi terkait.

Berdasarkan hasil observasi mayoritas informan terkait upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan komunikasi yang konsisten oleh dinas ketahanan pangan dan pertanian kepada masyarakat. tentang proses implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yaitu dengan berkomunikasi dan bekerjasama oleh semua pihak kepada masyarakat secara berkelanjutan sehingga masyarakat perlahan memahami terkait ketahanan pangan dan melindungi lahan pertanian.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan komunikasi yang konsisten oleh dinas ketahanan pangan dan pertanian kepada masyarakat yaitu dengan membuat jadwal yang kemudian dijalankan dengan baik guna tercapainya komunikasi secara terus menerus kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil uraian tiap indikator dari variabel komunikasi dapat disajikan bahwa upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu yaitu dengan mengkomunikasikan secara konsisten bersama dengan semua pihak. Kemudian agar komunikasi dapat berjalan baik yaitu dengan memahami kebiasaan atau

keinginan masyarakat khususnya dalam bidang pertanian sehingga tidak ada kesalah pahaman antar kedua pihak dan apa yang disampaikan terkait Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat efektif.

2. Sumber Daya

a. Upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan sumber daya manusia yang kompeten dalam proses Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Untuk mengetahui upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam sumber daya manusia yang kompeten dalam proses implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan oleh dinas ketahanan pangan dan pertanian. Hasil wawancara ini dikatakan oleh Sekertaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu yaitu :

“Dalam hal ini tentu pemerintah terus berupaya agar SDM dalam bidang ini tentu kompeten dan secara terus menerus”

Kemudian menurut kepala seksi Rehabilitasi Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman Pangan di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Upaya dalam menangani hambatan tersebut tentu badan kepegawaian dapat mencari calon dengan kriteria terbaik agar proses dari LP2B dapat terlaksana”

Kemudian menurut kepala Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Upayanya harus dilakukan pengawasan agar yang bertanggung jawab dalam menegakan kebijakan dapat bertanggung jawab dan dapat membina masyarakat terkait LP2B”

Kemudian menurut kepala Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Untuk upaya perlu perencanaan yang baik dari dinas dengan mengumpulkan orang-orang yang sangat mumpuni untuk menyelesaikan permasalahan LP2B”

Kemudian menurut kepala Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Harus benar-benar memilah dan memilih orang-orang yang kompeten, intinya harus selektif”

Kemudian menurut Kelompok Tani Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Pemerintah harus bisa mengajak pihak-pihak lain atau komunitas, organisasi yang bergerak di bidang pertanian agar ikut mensosialisasikan perlindungan lahan pertanian supaya terciptanya ketahanan pangan”

Kemudian menurut Kelompok Tani Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Rangkul anak-anak muda untuk menjadi generasi yang sadar dan ikut menjada lahan pertanian”

Kemudian menurut Kelompok Tani Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Upayanya harus saling bekerjasama dan tidak berjalan sendir-sendiri”

Dari hasil wawancara mayoritas informan mengatakan untuk upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam sumber daya manusia yang kompeten dalam proses implemebtasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yaitu BKSDM harus memiliki standarisasi yang baik dalam memilih pegawai.

Berdasarkan hasil observasi mayoritas informan terkait upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam sumber daya manusia yang kompeten dalam proses implemebtasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan oleh dinas ketahanan pangan dan pertanian yaitu dengan pengadaan pegawai yang selektif sehingga SDM yang kompeten dan menguasai tugasnya. Kemudia dengan melakukan pengawasan oleh semua pihak sehingga dalam menjalankan tugas berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya mengatasi hambatan-hambatan dalam sumber daya manusia yang kompeten dalam proses implemebtasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yaitu dengan memperketat selektifitas pengadaan pegawai baik itu dari BKSDM dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian agar mendapatkan pegawai yang memiliki kinerja yang sangat baik.

b. Upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan kewenangan yang bersifat formal dan kuat agar perintah dilaksanakan

Untuk mengetahui upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan kewenangan yang bersifat formal dan kuat agar perintah dilaksanakan. Hasil wawancara ini dikatakan oleh Sekertaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu yaitu :

“Harus ada pengawasan secara terus menerus dari semua dan sesama pegawai agar saling mengingatkan terkait tugasnya masing-masing”

Kemudian menurut kepala seksi Rehabilitasi Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman Pangan di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Upaya dalam menangani hambatan tersebut tentu badan kepegawaian dapat mencari calon dengan kriteria terbaik agar proses dari LP2B dapat terlaksana”

Kemudian menurut kepala Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Dengan melakukan pengawasan tentunya dan komunikasi”

Kemudian menurut kepala Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Upayanya dengan merencanakan dengan teliti. Agar semua kewenangan dapat dilaksanakam”

Kemudian menurut kepala Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Karena hambatannya sudah baik, untuk upayanya lebih memaksimalkan apa yang sudah ada”

Kemudian menurut Kelompok Tani Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Upayanya dengan pengawasan penuh”

Kemudian menurut Kelompok Tani Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Upayanya harus ada ketegasan di kepala atau pemimpin selaku pemilik kewenangan”

Kemudian menurut Kelompok Tani Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Upayanya dengan saling mengawasi satu sama lain”

Dari hasil wawancara mayoritas informan mengatakan untuk upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan kewenangan yang bersifat formal dan kuat agar perintah dilaksanakan yaitu dengan melakukan pengawasan secara ketat dan proses seleksi harus ketat agar mendapatkan yang terbaik.

Berdasarkan hasil observasi mayoritas informan terkait upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan kewenangan yang bersifat formal dan kuat agar perintah dilaksanakan yaitu dengan melakukan pengawasan baik itu dari dalam dan luar dinas juga saling mengawasi oleh sesama implementor agar tugas yang sudah ditetapkan dapat terus dilaksanakan sesuai dengan jalurnya. Kemudian proses pengadaan pegawai harus selektif sehingga mendapatkan orang-orang yang terbaik.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan kewenangan yang bersifat formal dan kuat agar perintah dilaksanakan yaitu dengan melakukan pengawasan oleh semua pihak agar semua rancana kegiatan dapat berjalan sesuai dengan kesepakatan.

c. Upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan fasilitas fisik dalam proses implementasi kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Untuk mengetahui upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan fasilitas fisik dalam proses implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Hasil wawancara ini dikatakan oleh Sekertaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu yaitu :

“Kita terus memperbaiki fasilitas yang ada dan pengadaan yang belum ada agar semua pekerjaan dapat di selesaikan dengan hasil yang maksimal”

Kemudian menurut kepala seksi Rehabilitasi Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman Pangan di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Agar aturan dapat terapkan tentu harus ada hal-hal penunjang seperti fasilitas apapun itu yang berhubungan dengan perlindungan lahan pertanian”

Kemudian menurut kepala Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Upayanya dengan kita memaksimalkan fasilitas yang sudah ada, dan menambahkan yang belum ada, agar dapat tetap menjalankan kewenangan yang kita punya terhadap pembenahan LP2B”

Kemudian menurut kepala Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Karena tidak ada hambatan jadi tidak upaya dalam hal tersebut. Tapi harus tetap memperbaiki dan menjaga apa yang sudah ada”

Kemudian menurut kepala Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Dengan mengajukan fasilitas yang kurang dan dengan memperbaiki fasilitas yang rusak juga menjaga sarana untuk menunjang perlindungan lahan pertanian”

Kemudian menurut Kelompok Tani Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Fasilitas yang dimaksud itu seperti menyediakan jalan dan penerangan kemudian yang paling penting disediakan saung di beberapa titik untuk tempat diskusi antara penyuluh atau dinas dengan petani atau masyarakat. Hal ini mungkin berpengaruh karena masyarakat semakin bersemangat dalam mengolah lahan, dengan demikian masyarakat akan melindungi lahan pertanian”

Kemudian menurut Kelompok Tani Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Upayanya atau harapan bisa memperbaiki fasilitas yang sudah ada dan menambahkan yang belum ada”

Kemudian menurut Kelompok Tani Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Upayanya dengan membuat fasilitas yang belum ada, seperti saung-saung pertanian untuk tempat diskusi antar kelompok tani dan menjaga, memperbaiki fasilitas yang sudah ada”

Dari hasil wawancara mayoritas informan mengatakan untuk upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan fasilitas fisik dalam proses implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yaitu dengan menyediakan fasilitas yang belum ada dan memperbaiki juga merawat fasilitas yang sudah ada.

Berdasarkan hasil observasi mayoritas informan terkait upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan fasilitas fisik dalam proses implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yaitu dengan merawat dan memperbaiki fasilitas yang sudah ada. Kemudian menambahkan fasilitas yang belum ada di dalam Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian maupun diluar untuk menunjang kemudahan dalam menjalankan tugas.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan fasilitas fisik dalam proses implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yaitu

dengan melakukan perawatan, memperbaiki, dan pengadaan fasilitas yang belum ada sehingga dalam proses pelayanan dapat maksimal.

Berdasarkan hasil uraian tiap indikator dari variabel sumber daya dapat disajikan bahwa upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu yaitu untuk mendapatkan SDM yang terbaik haruslah memiliki proses pengadaan yang terbaik juga sehingga ketika disiapkan untuk menjalankan tugas dapat sesuai dengan ketetapan yang berlaku di instansi terkait dan terus melakukan pengawasan, dengan adanya pengawasan maka pegawai memiliki beban besar untuk menjalankan tugas agar maksimal. Kemudian perlu mengadakan, merawat, dan memperbaiki fasilitas yang sehingga dapat menunjang kinerja pegawai.

3. Disposisi

a. Upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan membangun komitmen yang bertanggung jawab terhadap jalannya proses Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Untuk mengetahui upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam membangun komitmen yang bertanggung jawab terhadap jalannya proses Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Hasil wawancara ini dikatakan oleh Sekertaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu yaitu :

“Upayanya yaitu dengan terus melakukan pengawasan dan meningkatkan. Ini berlaku untuk setiap dan sesama pegawai”

Kemudian menurut kepala seksi Rehabilitasi Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman Pangan di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Untuk upaya sendiri kita perlu saling mengingatkan satu sama lain agar setiap aturan, rencana kegiatan, atau yang lainnya dapat berjalan sesuai dengan komitmen yang sudah di rencanakan”

Kemudian menurut kepala Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Upayangnya dengan menjalankannya secara sabar dan terus menerus agar kita terlatih dan belajar mengetahui kebutuhan dan cara menyampaikan sesuatu kepada masyarakat agar diterima dengan baik”

Kemudian menurut kepala Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Dengan berkomunikasi dengan semua pihak yang bertanggung jawab dalam penegakan kebijakan tersebut agar proses pengawasan dapat dilakukan semua pihak”

Kemudian menurut kepala Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Upayanya dengan melakukan pengawasan, karena jika diawasi mungkin akan berpikir jika ingin meninggalkan tanggung jawabnya”

Kemudian menurut Kelompok Tani Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Terus kawal atau awasi”

Kemudian menurut Kelompok Tani Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Upayanya dengan memunculkan orang-orang yang berpengaruh di dinas”

Kemudian menurut Kelompok Tani Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Dengan bekerja sama satu sama lain dan harus ada komunikasi yang baik”

Dari hasil wawancara mayoritas informan mengatakan untuk upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam membangun komitmen yang bertanggung jawab terhadap jalannya proses Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yaitu dengan melakukan pengawasan dan komunikasi.

Berdasarkan hasil observasi mayoritas informan terkait upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam membangun komitmen yang bertanggung jawab terhadap jalannya proses Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yaitu perlu adanya pengawasan oleh semua pihak yang bertanggung jawab terhadap jalannya proses Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan melakukan pengawasan menjadikan pegawai lebih teliti dalam

menjalankan tugas sehingga lebih tepat sasaran. Kemudian dengan melakukan komunikasi oleh semua pihak yang terlibat dalam proses Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam membangun komitmen yang bertanggung jawab terhadap jalannya proses Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yaitu perlu adanya pengawasan. Karena dengan melakukan pengawasan setiap pegawai secara tidak langsung menjalankan tugas secara cepat dan tepat.

b. Upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan pembagian kerja sesuai dengan kemampuan petugas dalam Implementasi kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Untuk mengetahui upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan pembagian kerja sesuai dengan kemampuan petugas dalam Implementasi kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Hasil wawancara ini dikatakan oleh Sekertaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu yaitu :

“Kita harus teliti sebelum proses pengadaan pegawai misal dalam pendidikan kita harus kualifikasi sesuai yang kita butuhkan dengan kriteria tertentu agar ketika ditempatkan dapat menjalankan tugas dengan baik”

Kemudian menurut kepala seksi Rehabilitasi Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman Pangan di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Upayanya yaitu dengan membuat sistem prosedural yang baik tentunya sebelum mengajukan”

Kemudian menurut kepala Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Tetap melakukan pengawasan tentunya”

Kemudian menurut kepala Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Untuk memaksimalkan kemampuan petugas tentu harus ada pertimbangan sebelum pembagian pekerjaan. Hal ini lebih meminimalisir terjadinya permasalahan di lapangan”

Kemudian menurut kepala Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Upayanya atau harapan mungkin lebih ditingkatkan lagi kemampuan petugas agar yang baik akan semakin baik”

Kemudian menurut Kelompok Tani Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Upayanya dengan melakukan pengawasan, oleh semua pegawai dan saling mengingatkan”

Kemudian menurut Kelompok Tani Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Upaya dalam hal itu dengan membuat pedoman dengan kriteria yang ketat”

Kemudian menurut Kelompok Tani Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Dengan memaksimalkan pertimbangan sebelum memutuskan”

Dari hasil wawancara mayoritas informan mengatakan untuk upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan pembagian kerja sesuai dengan kemampuan petugas dalam Implementasi kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yaitu dengan memiliki standarisasi dalam pengadaan pegawai yang ketat kemudian terus melakukan pengawasan agar tugas berjalan sesuai dengan yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil observasi mayoritas informan terkait upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan pembagian kerja sesuai dengan kemampuan petugas dalam Implementasi kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yaitu dengan memiliki standarisasi yang ketat dalam pengadaan pegawai. Kemudian dalam proses yang ketat dan ketika mulai menjalankan tugas harus diawasi oleh semua pihak agar tetap sesuai dengan tupoksinya.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan pembagian kerja sesuai dengan kemampuan petugas dalam Implementasi kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yaitu dengan kembali ke pedoman yang sudah ditetapkan Dinas terkait kepegawaian sehingga dalam pembagian kerja dapat sesuai dengan kemampuan.

c. Upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan tansparansi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dengan pemerintah, pihak swasta dan masyarakat

Untuk mengetahui upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan tansparansi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dengan pemerintah, pihak swasta dan masyarakat. Hasil wawancara ini dikatakan oleh Sekertaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu yaitu :

“Kita wajib memberikan transparansi berupa apapun kepada pemerintah, pihak-pihak yang bekerja sama dan masyarakat. Ini perlu adanya inofasi agar informasi yang di perlukan dapat diakses semua orang seperti interneti, jadi tidak ada yang di tutup-tutupi”

Kemudian menurut kepala seksi Rehabilitasi Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman Pangan di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Upaya dalam menangani hambatan tersebut dengan memperbaiki SDM di masyarakat khususnya kelompok tani agar dapat menggunakan teknologi seperti smartphome. Supya kita dapat bebas menginformasikan segala sesuatu tanpa harus bertatap muka”

Kemudian menurut kepala Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Dengan mengadapkn fasilitas seperti penempelan atau sepanduk yang berisi informasi agar semua orang dapat melihat”

Kemudian menurut kepala Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Upaya dalam menangani hal tersebut tentu mensosialisasikan juga bahwa dinas sendiri memiliki informasi yang terbuka untuk semua orang yang ingin mengetahuinya”

Kemudian menurut kepala Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Upayanya dengan berbenah dari informasi yang sudah di sebar, itu saja”

Kemudian menurut Kelompok Tani Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Upayanya dengan membangun tempat-tempat atau titik kumpul untuk musyawarah antara dinas atau penyuluh dengan masyarakat”

Kemudian menurut Kelompok Tani Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Upayanya dengan memanfaatkan teknologi sekarang dan ada khusus admin untuk memberikan informasi”

Kemudian menurut Kelompok Tani Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Kemudian pemerintahnya harus memberikan informasi untuk memberikan informasi seperti spanduk atau poster dan surat bisa juga dengan memanfaatkan teknologi kalo sekarang”

Dari hasil wawancara mayoritas informan mengatakan untuk upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan transparansi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dengan pemerintah, pihak swasta dan masyarakat yaitu dengan memanfaatkan teknologi sehingga semua pihak bisa mengakses informasi yang tersedia di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Berdasarkan hasil observasi mayoritas informan terkait upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan transparansi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dengan pemerintah, pihak swasta dan masyarakat yaitu dengan pengadaan fasilitas seperti saung di setiap blok persawahan untuk memungkinkan adanya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat juga sebagai tempat berdiskusi antar petani.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan transparansi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dengan pemerintah, pihak swasta dan masyarakat yaitu dengan memperbaiki dan pengadaan sarana untuk mendukung tersampainya informasi dari implementor kepada masyarakat, sehingga proses transparansi dapat terlaksana.

Berdasarkan hasil uraian tiap indikator dari variabel disposisi atau sikap pelaksana kebijakan dapat disajikan bahwa upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu yaitu dengan melakukan pengawasan oleh kepala maupun sesama pegawai.

Komitmen tersebut akan berdampak pada peningkatan kedisiplinan dan sikap pegawai karena selalu ada pengawasan dan saling berkomunikasi.

4. Struktur Birokrasi

a. Upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan struktur organisasi yang menguasai tupoksinya

Untuk mengetahui upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan struktur organisasi yang menguasai tupoksinya. Hasil wawancara ini dikatakan oleh Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu yaitu :

“Kita awasi, dengan sesama pegawai agar semuanya bisa saling memberikan pengawasan dan dapat menjalankan tugas sesuai tupoksinya”

Kemudian menurut kepala seksi Rehabilitasi Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman Pangan di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Upayanya yaitu dengan terus memberikan arahan dan saling mengingatkan satu sama lain. Ini berlaku untuk semua pegawai agar dalam pelayanan kepada masyarakat dapat maksimal”

Kemudian menurut kepala Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Upayanya dengan melakukan pengawasan oleh semua pegawai tentunya dan saling mengingatkan”

Kemudian menurut kepala Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Upayanya tentu memperbaiki apa yang sudah ada tinggal melakukan pengawasan”

Kemudian menurut kepala Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Upayanya terus bersinergi menjadi lebih baik, atau memperbaiki diri agar tidak ada tugas yang terlewatkan apa lagi ditinggalkan”

Kemudian menurut Kelompok Tani Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Proses testingnya harus baik”

Kemudian menurut Kelompok Tani Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Upaya untuk mempererat dengan menjalin komunikasi”

Kemudian menurut Kelompok Tani Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Kemudian pemerintahnya harus memberikan informasi untuk memberikan informasi seperti spanduk atau poster dan surat bisa juga dengan memanfaatkan teknologi kalo sekarang”

Dari hasil wawancara mayoritas informan mengatakan untuk upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan struktur organisasi yang menguasai tupoksinya yaitu dengan melakukan pengarahan, pengawasan, sesama pegawai dan saling

berkomunikasi. Dengan demikian proses berjalannya tugas dapat sesuai dengan standar yang ditetapkan

Berdasarkan hasil observasi mayoritas informan terkait upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan struktur organisasi yang menguasai tupoksinya yaitu dengan melakukan komunikasi dan pengawasan. Ini berdampak pada kinerja pegawai yang akan menjalankan tugas sesuai perencanaan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan struktur organisasi yang menguasai tupoksinya yaitu dengan melakukan pengawasan oleh semua pihak dengan demikian meminimalisir terjadinya pegawai yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan perencanaan.

b. Upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan rasa saling memotivasi dan membangun oleh pelaksana kebijakan

Untuk mengetahui upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan rasa saling memotivasi dan membangun oleh pelaksana kebijakan. Hasil wawancara ini dikatakan oleh Sekertaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu yaitu :

“Kita perlu berkomunikasi secara terus menerus, keterbukaan sesama pegawai agar dapat membantu ketika ada permasalahan yang perlu diselesaikan secara bersama”

Kemudian menurut kepala seksi Rehabilitasi Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman Pangan di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Upayanya kita harus jalin tali komunikasi secara terus menerus”

Kemudian menurut kepala Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Upayanya dengan sering berkomunikasi”

Kemudian menurut kepala Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Upayanya sama yaitu terus saling berkomunikasi antar pegawai dan masyarakat”

Kemudian menurut kepala Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Terus jalin komunikasi yang baik antar pegawai agar kinerjanya semakin baik”

Kemudian menurut Kelompok Tani Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Upayanya haru memahami satu sama lain”

Kemudian menurut Kelompok Tani Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Menggunakan komunikasi yang baik dan memahami karakter masing-masing pegawai”

Kemudian menurut Kelompok Tani Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa :

“Upayanya dengan memperketan SOPnya”

Dari hasil wawancara mayoritas informan mengatakan untuk upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan rasa saling memotivasi dan membangun oleh pelaksana kebijakan yaitu dengan menjaga komunikasi

Berdasarkan hasil observasi mayoritas informan terkait upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan rasa saling memotivasi dan membangun oleh pelaksana kebijakan yaitu dengan saling berkomunikasi secara konsisten agar saling memahami karakter masing-masing pegawai.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan rasa saling memotivasi dan membangun oleh pelaksana kebijakan yaitu dengan melakukan komunikasi dan saling memberi masukan ketika terdapat hambatan yang sedang dihadapi setiap pegawai.

Berdasarkan hasil uraian tiap indikator dari variabel struktur birokrasi dapat disajikan bahwa upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu yaitu dalam proses perencanaan perlu ada pengawasan dengan cara komunikasi sehingga antara aturan bisa selaras dengan proses berjalannya tugas.

Berdasarkan uraian setiap indikator komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi maka dapat disimpulkan bahwa Upaya dalam mengatasi

Hambatan-hambatan dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu yaitu komunikasi dan sosialisasi harus dilakukan secara terus menerus secara konsisten dan melakukan pengawasan oleh semua pihak baik kepala maupun sesama pegawai sehingga tugas yang dikerjakan dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditentukan.

4.2 PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.2.1 Pembahasan Mengenai Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan beberapa informan, maka peneliti akan melakukan pembahasan mengenai Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu. Pada umumnya implementasi kebijakan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan belum berjalan maksimal karena masih ditemukan hambatan-hambatan.

Untuk dapat mengukur sejauh mana implementasi kebijakan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan berdasarkan pada teori menurut George C. Edward III (dalam Agustino, 2020:90) implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yaitu :

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada dasarnya telah diimplementasikan semaksimal mungkin. Selanjutnya guna membahas lebih jelas mengenai implementasi peraturan daerah tersebut dapat diuraikan menurut dimensinya sebagai berikut :

1. Komunikasi

Berdasarkan hasil penelitian berkaitan dengan dimensi komunikasi secara keseluruhan belum berjalan dengan baik dan terdapat miskomunikasi antara Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan Balai Penyuluh Pertanian dengan masyarakat karena komunikasi yang dilakukan kurang konsisten. Hal ini sejalan dengan pendapat Meter dan Horn (dalam Suhjianto 2008:35) bahwa :

Implementasi yang efektif memerlukan standar dan tujuan program dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab agar implementasi tercapai. Maka perlu melibatkan komunikasi yang konsisten dengan maksud mengumpulkan informasi. Komunikasi antara organisasi merupakan hal yang kompleks. Penyampaian informasi kebawah pada suatu organisasi atau organisasi yang satu ke organisasi yang lain, mau atau tidak komunikator baik secara sengaja atau tidak. Implementasi yang akan berhasil memerlukan mekanisme dan prosedural institusional dimana otoritas yang lebih tinggi dapat memungkinkan pelaksana akan bertindak dengan konsisten.

Dari pendapat Meter dan Horn (dalam Suhjianto 2008:35) serta hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa keberhasilan dari proses implementasi suatu kebijakan yaitu diperlukan komunikasi yang dilakukan secara konsisten.

2. Sumber Daya

Berdasarkan hasil penelitian berkaitan dengan dimensi sumber daya bahwa dari aspek sumber daya manusia yang ada di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sudah memadai. Hal ini dikarenakan proses yang selektif oleh BKSDM sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dalam menjalankan tugas. Kemudian terdapat fasilitas fisik yang memadai, hanya perlu menambahkan, memperbaiki, dan merawat fasilitas yang sudah ada.

Adapun pendapat yang dikemukakan oleh Donald van Metter dan Carl E. van Horn (dalam Agustino 2020:151) bahwa “Keberhasilan proses implementasi sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.”

Berdasarkan hasil penelitian serta dikaitkan dengan teori menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa untuk mengukur sumber daya maka perlu sumber daya manusia, tata cara mengimplementasikan kebijakan, serta fasilitas fisik yang memadai.

3. Disposisi

Berdasarkan penelitian berkaitan dengan dimensi disposisi atau sikap para pelaksana Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu kurang maksimal karena kurangnya pengawasan terhadap pegawai sehingga berdampak pada kecenderungan lupa dalam tugas pokoknya yang sudah disepakati diawal. Kemudian kurang selektif dalam proses pembagian kerja sehingga dalam penerapannya berjalan namun tidak maksimal dan perlu adanya fasilitas untuk menunjang proses transparansi kepada masyarakat sehingga masyarakat mengetahui informasi yang diberikan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan Balai Penyuluh Pertanian. Menurut Donald van Metter dan Carl E. van Horn (dalam Agustino 2020:152) bahwa “Sikap penerima atau penolakan dari pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tindaknya kinerja implementasi kebijakan publik.”

Kemudian menurut Merilee S. Grindle (dalam Agustino 2020: 159)

bahwa :

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik amat ditentukan oleh tingkat *implementability* yang terdiri atas *Content of Policy* dan *Context of Policy*. *Content of policy* meliputi kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi, tipe manfaat, derajat perubahan, dan sumber daya yang digunakan. *Context of Policy* meliputi kekuasaan, karakteristi lembaga dan rezim yang berkuasa, tingkat keputusan dan adanya respon dari pelaksana.

Berdasarkan hasil penelitian serta dikaitkan dengan menurut para ahli bahwa untuk keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik sangat ditentukan oleh sikap dari implementor, karakteristik lembaga yang berkuasa, tingkat kepatuhan, dan adanya respon dari pelaksana.

4. Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi struktur birokrasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu sudah berjalan baik dan sesuai dengan *Standar Operating Procedures* (SOP). Dengan adanya SOP, dan terdapat komunikasi yang baik antar pegawai berdampak pada ketepatan dalam menjalankan tugas masing-masing. Menurut Leo Agustino (2020:173) bahwa “Tidak dapat dipungkiri bahwa tidak semua objek kebijakan patuh atas aturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah..”

Adapun pendapat Metter dan Horn (dalam Sujianto 2008:35) bahwa :

Struktur birokrasi dianggap karakteristik, norma dan pola hubungan dalam eksekutif yang memiliki aktual atau potensi apa yang dilakukan dalam kebijakan, lebih jelasnya karakteristik hubungan dengan kemampuan dan kriteria staf tingkat pengawas (kontrol) hirarkis terhadap keputusan-keputusan sub unit dalam proses implementasi. Sumber daya pelaksana, validitas organisasi, tingkat komunikasi terbuka, yaitu jaringan komunikasi vertikal dan horizontal dalam organisasi hubungan formal dan informal antara pelaksana dengan pembuat kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian serta pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa untuk mengukur struktur birokrasi meliputi kemampuan dan kriteria staf tingkat pengawas (kontrol) hirarkis terhadap keputusan-keputusan dalam proses implementasi, sumber daya pelaksana, validitas organisasi, tingkat komunikasi terbuka.

4.2.2 Pembahasan Mengenai Hambatan-Hambatan Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu

Selanjutnya menurut hasil penelitian bahwa hambatan-hambatan Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya komunikasi yang konsisten dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, hal ini dapat dilihat dari masyarakat yang kurang mengetahui informasi yang diberikan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
2. Kurangnya sosialisasi dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, yang berdampak pada perbedaan pendapat antara masyarakat dan pemerintah.
3. Kurangnya kerjasama antara semua instansi pemerintah, hal ini ditandai dengan kebingungan masyarakat dalam siapa yang berhak menangani alih fungsi lahan.
4. Kurangnya pengawasan seama pegawai, hal ini ditandai dengan perubahan dalam menjalankan tugas, pelayanan yang kurang maksimal, dan kurang cepat dalam mengambil keputusan.

Berdasarkan hasil penelitain secara keseluruhan terdapat hambatan-hambatan dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu.

Adapun menurut Purwanto dan Sulistyastuti (2015:21) bahwa “implementasi intinya kegiatan adalah untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh implementor kepada kelompok-kelompok sasaran sebagai upaya untuk mencapai tujuan kebijakan.”

Kemudian menurut Leo Agustino (2020:177) bahwa “implementasi kebijakantidak jarang melibatkan banyak pemangku kebijakan dan Stakeholder. Oleh karena itu, koordinasi merupakan mantra penting dalam melakukan keefektifan suatu implementasi kebijakan.”

Berdasarkan hasil penelitian dan teori para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan kegiatan yang harus melibatkan banyak pihak didalamnya guna memaksimalkan tujuan suatu kebijakan.

4.2.3 Pembahasan Mengenai Upaya dalam Mengatasi Hambatan-Hambatan Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu

Berdasarkan hasil penelitian terkait upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu dapat disajikan upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan sebagai berikut :

1. Melakukan komunikasi kepada masyarakat secara berkala dan terprogram mengenai semua informasi yang harus disampaikan. Sehingga proses dalam transparansi dapat berjalan maksimal.

2. Dengan memahami budaya, kebutuhan, dan keluhan masyarakat sehingga pemerintah dapat memahami apa yang perlu dan tidak perlu disamapiakan.
3. Melakukan kumunikasi kepada semua pihak mulai dari tingkat Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, dan Pemerintahn Desa, Kemudian Dinas Ketahanan Pangan harus bekerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Polisi, dan TNI untuk bersama-sama menginformasikan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan agar terwujudnya ketahanan pangan.
4. Melakukan pengawasan oleh semua pihak baik itu di dalam Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian maupun diluar.

Adapun menurut Indiahono (2009:18) bahwa :

Kebijakan publik dalam kerangka substansi adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah untuk memecahkan masalah publik yang dihadapinya. Dengan membawa kebijakan publik ke ranah upaya pemecahan masalah pyblik maka warna administrasi publik akan terasa lebih kental.

Berdasarkan hasil penelitian dan menurut teori para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan upaya yang ditempuh pemerintah dalam mengatasi permasalahan publik, melalu manajemen perencanaan yang baik agar mendapatkan hasil yang baik.

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan penelitian dapat disimpulkan dari variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi ini terdapat dua variabel yang bermasalah yaitu komunikasi dan disposisi. Karena dalam variabel komunikasi terdapat miskomunikasi dan perbedaan pendapat

antara implementor dan masyarakat karena kurangnya sosialisasi atau pendekatan kepada masyarakat dan komunikasi tidak konsisten. Kemudian variabel disposisi walaupun dipengaruhi oleh sumber daya dan struktur birokrasi yang baik tetapi dalam kenyataan dilapangan berbanding terbalik. Ini dipengaruhi oleh pengawasan yang kurang ketat sehingga sikap para peaksana kebijakan seringkali berubah dari apa yang sudah disepakati dengan kenyataan dilapangan.

Berdasarkan hasil uraian tersebut dapat disimpulkan korelasi antara teori George C. Edward III dengan Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu tentu sangat berhubungan. Untuk terciptanya ketahanan pangan dan lahan pertanian yang utuh perlu adanya komunikasi dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian juga pihak-pihak terkait kepada masyarakat sehingga antara pemerintah dan masyarakat dapat bekerjasama dengan baik. Kemudian untuk memaksimalkan struktur birokrasi dan sikap dari pelaksana perlu didukung kualitas sumber daya yang baik dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dengan demikian penerapan kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu yaitu untuk komunikasi belum berjalan maksimal dan terdapat miskomunikasi antara Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan Balai Penyuluh Pertanian dengan masyarakat karena komunikasi yang dilakukan kurang konsisten. Kemudian untuk sumber daya manusia yang ada di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sudah memadai dikarenakan proses yang selektif oleh BKSDM sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dalam menjalankan tugas. Kemudian terdapat fasilitas fisik yang memadai, hanya perlu menambahkan, memperbaiki, dan merawat fasilitas yang sudah ada. Kemudian disposisi atau sikap para pelaksana Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu kurang maksimal karena kurangnya pengawasan terhadap pegawai sehingga berdampak pada kecenderungan lupa dalam tugas pokoknya yang sudah disepakati diawal. Kemudian kurang selektif dalam proses pembagian kerja sehingga dalam penerapannya berjalan namun tidak maksimal dan perlu adanya fasilitas untuk menunjang proses transparansi kepada masyarakat sehingga masyarakat mengetahui informasi yang diberikan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan Balai Penyuluh Pertanian. Kemudian struktur birokrasi Dinas Ketahanan

Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu sudah berjalan baik dan sesuai dengan *Standar Operating Procedures* (SOP). Dengan adanya SOP, dan terdapat komunikasi yang baik antar pegawai berdampak pada ketepatan dalam menjalankan tugas masing-masing.

5.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut :

1. Dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu sebaiknya mempertahankan aspek implementasi kebijakan yaitu aspek komunikasi, aspek sumber daya, aspek disposisi, dan aspek struktur birokrasi.
2. Untuk meminimalisir munculnya hambatan-hambatan dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu yaitu dengan melakukan komunikasi secara berkala dengan semua pihak di dalam maupun di luar Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, melakukan sosialisasi agar meminimalisir terjadinya kesalah pahaman antara Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan masyarakat, melakukan pengawasan terhadap kinerja pegawai, program Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, fasilitas dan sikap dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat, dan bekerja sama dengan semua pihak dari

tingkat Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, dan Pemerintahn Desa, Kemudian Dinas Ketahanan Pangan harus bekerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Polisi, dan TNI. Pengajuan fasilitas yang kurang dan memperbaiki, merawat fasilitas yang sudah ada.

3. Untuk mengoptimalkan upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu dengan menjalin komunikasi dengan semua pihak pemerintah maupun swasta dan masyarakat, melakukan pengawasan terhadap kinerja pegawai dan laporan-laporan lainnya. untuk memaksimalkan sumber daya yaitu dengan memaksimalkan proses seleksi dengan menggunakan prosedur yang ketat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung. Alfabeta.
- Agustinus, Leo. 2006. *Politik dan Kebijakan publik*. Bandung: AIPI.
- Abdoellah, Awan, dan Yudi Rusfiana. 2016. *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Agustino, Leo. 2017. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Amir Santoso. (1988). *Analisis Kebijakan Publik*. *Jurnal Ilmu Politik* Nomor III. Jakarta. PT. Gramedia
- Barlowe. R.. (1978). *Land Resource Economics*. Prentice Hall Inc.. Englewood Cliffs. N. J..
- Black. (2002) *A Dictionary of Economics*. Oxford University Press.
- Bappenas. (2016). *Evaluasi pelaksanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Direktorat Pangan dan Pertanian*. Jakarta.
- Boedi Harsono, 2018: *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- Indiahono. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Irfan Islamy.M . (1994). *Kebijakan Negara*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Islamy, Irfan M. 2014. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- Islamy, Muh.Irfan, 2011, *Kebijakan Publik*, Jakarta: Universitas Terbuka.

- Marliani. 2020. *Optimalisasi Penggunaan Lahan Pertanian, Suatu kajian dari Perencanaan Pembangunan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Moleong, Lexy J.2013. *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Purwaningsih, Yunastiti. Dkk. 2011. *Analisis Identifikasi Faktor Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Ketahanan Pangan Rumah Tangga di Jawa Tengah tahun 2009*. Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Sebelas Maret. Vol. 11.
- Purwanto, Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Putra. 2003. *Partai Politik dan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Silalahi, Ulber, 2013, *Asas-Asas Manajemen, Cetakan Kedua*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Subarsono. 2009. *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Subarsono. 2020. *Analisis Kebijakan Publik*.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sumaryanto dan Tahlim, 2018 : *Intensifikasi Lahan Melalui Sistem Pertanian Terpadu: Sebuah Tinjauan*, UAD-Press, Jakarta.
- Sugandi, 2011, *Administrasi Publik*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiana. 2009. *Metode Riset Bisnis dan Manajemen*. Bandung: Guardaya Intimarta
- Sugiana, A. G. 2011. *Ecotourism: Pengembangan Pariwisata Berbasis Konservasi Alam*. Bandung: Guardaya Intimarta.
- Surbakti. 2013. *Memahami Ilmu Politik*. Yogyakarta: PT. Grasindo.
- Tangkilisan. 2001. *Manajemen Publik*. Jakarta: PT. Grasindo

- Tachjan, 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Bandung.
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI. Panduan KKL.
- Usman Rianse. 2012. *Metodologi Penelitian Sosial dan. Ekonomi*, Bandung: Alfabeta.
- Wahab, Solichin. 2014. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke. Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahab, Solichin Abdul. 2015. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Wahab, Solichin Abdul. 2017. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Wibawa. 2014. *Kebijakan Publik Proses dan Analisis*. Jakarta.
- Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia.
- Winarno. 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.

B. Dokumen-dokumen :

- Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

C. Jurnal/Skripsi

- Nurwanda, A. 2016. *Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang BUMD (BPR-BKPD) BANK PERKREDITAN RAKYAT TERHADAP PELAYANAN PEMBERIAN KREDIT DI KABUPATEN CIAMIS*. Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 2(2), 861-870.
- Saptini, 2015: *Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Klaten Dalam Rangka Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten*
- Wicaksono. 2020. *Implementasi Program Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Karawang: Studi Kasus Penetapan Luas Baku Sawah*. Jejaring Administrasi Publik, 12(1), 90-107.
- Wulandari, D. A., & Rahman A. Z. 2017. *Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Tegal (Studi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032)*. *Journal of Public Policy and Management Reveiw*, 6(2),696-708.